

**TESIS**

**BUDAYA KOMUNIKASI POLITIK TELLU CAPP  
DIKALANGAN POLITISI BUGIS BONE PADA ERA  
KONTEMPORER**

*CULTURE COMMUNICATION POLITICAL TELLU CAPP  
AMONG BUGIS BONE POLITICIANS IN THE  
CONTEMPORARY ERA*

**MUHAMMAD IQBAL  
E022201004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**BUDAYA KOMUNIKASI POLITIK TELLU CAPPA DIKALANGAN  
POLITISI BUGIS BONE PADA ERA KONTEMPORER**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi  
Ilmu Komunikasi

Disusun Dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD IQBAL  
E022201004

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### BUDAYA KOMUNIKASI POLITIK *TELLU CAPP* DIKALANGAN POLITISI BUGIS BONE PADA ERA KONTEMPORER

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD IQBAL**

E022201004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Ilmu Komunikasi Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **16 AGUSTUS 2022**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Komisi Penasehat,



Dr. Muliadi Mau, M.Si.  
Ketua



Dr. Arianto, S.Sos., M.Si.  
Anggota

Ketua Program Studi  
Ilmu Komunikasi,



Dr. H. Muhammad Farid, M.Si.  
NIP. 19610716 198702 1 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Dr. Phil. Sukri, S.I.P., M.Si.  
NIP. 19750818 200801 1 008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD IQBAL

NIM : E022201004

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Iqbal

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Dzat yang maha sempurna, Dzat yang maha kuasa, Dzat maha indah dan maha benar diatas segala kebenaran, Dzat yang meberikan hidup dan kehidupan bagi hamba-Nya, hanya dengan izin Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Budaya Komunikasi Politik Tellu Cappa Dikalangan Politisi Bugis Bone Pada Era Kontemporer” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom), Program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Sebagai manusia yang penuh keterbatasan, banyak kendala yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini, akan tetapi berkat bantuan-Nya dan bantuan dari berbagai pihak, tesis ini dapat diselesaikan walaupun tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Arsyad Rifai dan Ibunda Jumriati yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh saat ini.
2. Dr. H. Muhammad Farid, M.Si selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasehat, serta pelayanan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
3. Dr. Muliadi Mau, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Arianto, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang dengan segala kesediaan dan kesabarannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan

mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

4. Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si, Dr. Muhammad Basir, MA, dan Dr. Muhammad Farid, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan segala jerih payahnya yang telah mengajarkan ilmu, memberikan wawasan yang luas untuk penulis serta membantu dalam memberikan pelayanan selama proses perkuliahan.
6. Ketua DPRD Kabupaten Bone beserta jajarannya, dan tokoh masyarakat yang telah bersedia menjadi informan dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
7. Untuk semua teman-teman seperjuangan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 yang menemani disaat suka dan duka, terima kasih dukungan dan segala bantuannya.
8. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini yang belum sempat disebut namanya satu persatu. Terima kasih atas segala bantuannya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan diterima dengan senang hati demi kesempurnaan tesis ini.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 24 Agustus 2022

Muhammad Iqbal

## ABSTRAK

**MUHAMMAD IQBAL.** *Budaya Komunikasi Politik Tellu Cappa di Kalangan Politisi Bugis Bone pada Era Kontemporer* (dibimbing oleh Muliadi Mau dan Arianto).

Komunikasi politik di suatu daerah biasanya tidak lepas dari nilai-nilai budaya yang ada di daerah tersebut. Komunikasi politik mentransmisikan nilai-nilai budaya politik yang bersumber dari pandangan hidup atau ideologi bersama masyarakatnya kepada generasi baru dan memperkuat proses pembudayaannya dalam diri generasi yang lebih tua. Salah satu budaya Bugis Bone yang dijadikan sebagai budaya komunikasi politik adalah *tellu cappa* yang berarti tiga ujung, yaitu *cappa lila* yang artinya ujung lidah, *cappa badik* yang artinya ujung badik dan *cappa laso* yang berarti ujung kemaluan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan : (1) eksistensi budaya komunikasi politik *tellu cappa* dikalangan politisi Bugis Bone pada era kontemporer; (2) proses penerapan budaya komunikasi politik *tellu cappa* dikalangan politisi Bugis Bone pada era kontemporer; dan (3) *cappa* apa yang paling sering digunakan dikalangan politisi Bugis Bone pada era kontemporer. Metode penelitian menggunakan paradigma kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan sebanyak 10 orang dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) budaya komunikasi politik *tellu cappa* eksis digunakan dalam proses komunikasi politik politisi Kabupaten Bone; (2) dalam proses perpolitikan politisi Bugis Bone menggunakan *tellu cappa*, dimana *cappa lila* adalah bentuk dari diplomasi, *cappa badik* adalah bentuk perlawanan dan *cappa laso* artinya penyatuan dengan orang lain; dan (3) *cappa* yang paling sering digunakan di kalangan politisi Bugis Bone pada era kontemporer ini adalah *cappa lila*.

Kata kunci. Komunikasi Politik, Bugis Bone, *Tellu Cappa*.



2022-03-23

## ABSTRACT

**MUHAMMAD IQBAL. Political communication culture “Tellu Cappa” among Bugis Bone politicians in contemporary era** (supervised by Muliadi Mau and Arianto).

The political communication in an area is usually inseparable from the cultural values existing in that area. The political communication transmits the political cultural values originating from the view of life or ideology together with the community to the new generation and strengthens the civilising process it in the older generation. One of Bugis Bone cultures being used as the political communication culture is “tellu cappa” which means three ends. They are: “cappa lila” meaning the tip of the tongue, “cappa badik” meaning the tip of “badik” (traditional knife), and “cappa laso” meaning the tip of genital. The research aims to describe: (1) the existence of the political communication culture “tellu cappa”; (2) the application process of the political communication culture “tellu cappa”; and (3) what end (cappa) which is most frequently used among Bugis Bone politicians in the contemporary era. The research used the qualitative paradigm method using the qualitative descriptive approach. Informants were as many as 10 people who were selected using the purposive sampling technique. The research result indicates that (1) the political communication culture “tellu cappa” is exist and used in the political communication process by Bone Regency politicians; (2) in the political process, Bugis Bone politicians use “tellu cappa”, in which “cappa lila” is the form of a diplomacy, “cappa badik” is the form of resistance, and “cappa laso” is the form of union with others; (3) the end (cappa) which is most frequently used among Bugis Bone politicians in the contemporary era is “cappa lila”.

Key words: Political communication, Bugis Bone, “tellu cappa” (three ends).



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Hasil Penelitian .....	15
B. Tinjauan Teori dan Konsep .....	18
1. Suku Bangsa Bugis.....	18
2. Falsafah <i>Tellu Cappa</i> .....	20
2.1. Politik Penguasaan Arung Palaka Menggunakan Tellu Cappa.....	24
2.2. Penaklukan Kerajaan Bima Oleh Kerajaan Gowa menggunakan Tellu Cappa.....	30
3. Budaya .....	32
3.1. Perwujudan Budaya.....	33
4. Budaya Politik .....	36

5. Komunikasi.....	50
5.1. Tujuan Komunikasi.....	51
5.2. Bentuk-Bentuk Komunikasi.....	52
5.3. Fungsi Komunikasi.....	54
5.4. Kompnen-Komponen Komunikasi.....	55
6. Politik.....	57
6.1. Definisi Politik.....	58
6.2. Dimensi Politik.....	62
7. Komunikasi Politik .....	69
7.1. Fungsi Komunikasi Politik .....	80
7.2. Etika Komunikasi Politik .....	83
8. Retorika .....	85
C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Pengarah .....	89
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>91</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	91
B. Lokasi Penelitian .....	92
C. Sumber Data .....	92
D. Teknik Pengumpulan Data .....	92
1. Wawancara .....	93
2. Observasi .....	94
3. Dokumentasi .....	95
E. Teknik Analisis Data .....	95
F. Jadwal Perencanaan Penelitian .....	98

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>99</b>
A. Hasil Penelitian .....	99
B. Pembahasan .....	134
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>164</b>
A. Kesimpulan.....	164
B. Saran .....	166
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>168</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	98
Tabel 4.1 Susunan Pimpinan DPRD Kab. Bone.....	104
Tabel 4.2 Susunan Komisi DPRD Kab. Bone.....	104
Tabel 4.3 Informan Penelitian.....	106

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Foto Raja Bone ke 15 dan 16 .....	9
Gambar 2.1 Sistem Politik Dalam Komunikasi Politik.....	73
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	89
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bone.....	99
Gambar 4.4.1 Penerapan Cappa Laso.....	117
Gambar 4.4.2 Penerapan Cappa Badik.....	118
Gambar 4.4.3 Penerapan Cappa Laso.....	120
Gambar 4.4.4 Penerapan Cappa Laso.....	121
Gambar 4.4.5 Penerapan Cappa Badik.....	123
Gambar 4.4.6 Penerapan Cappa Badik.....	124
Gambar 4.5.1 Penerapan Cappa Lila.....	127
Gambar 4.5.2 Penerapan Cappa Lila.....	128
Gambar 4.5.3 Penerapan Cappa Lila.....	129
Gambar 4.5.4 Penerapan Cappa Lila.....	130
Gambar 4.5.5 Penerapan Cappa Lila.....	131

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Komunikasi politik sangat penting peranannya bagi setiap negara baik yang berbentuk otoriter maupun liberal. McQuail (1992:472-473) mengartikan komunikasi politik sebagai keseluruhan proses penyampaian informasi termasuk fakta, pendapat-pendapat, keyakinankeyakinan dan sebagainya, pertukaran dan pencarian tentang itu semua yang dilakukan oleh para partisipan dalam konteks kegiatan politik yang lebih bersifat melembaga).

Komunikasi politik di sebuah negara biasanya tidak lepas dari nilai-nilai budaya yang ada di negara tersebut. E.B. Taylor seperti yang dikutip oleh Lubis (2002:2), mendefenisikan budaya sebagai sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuankemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Budaya dan komunikasi mempunyai hubungan timbal balik, seperti dua sisi mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya seperti yang dikatakan Edward T. Hall bahwa komunikasi adalah Budaya dan Budaya adalah komunikasi. Pada satu sisi, komunikasi merupakan

suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara “horizontal” dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada sisi lain, budaya merupakan norma-norma atau nilai-nilai yang dianggap sesuai untuk kelompok tertentu (Mulejana dalam Lubis, 2002:1).

Komunikasi politik mempunyai peranan penting dalam memelihara dan meningkatkan kualitas system politik. Komunikasi politik, sebagaimana kita tahu, mempersambungkan tiap bagian, dan juga keseluruhan dari suatu system politik. Kemudian Almond (Alfian, 1993 : 5-15) menyatakan komunikasi dalam sistem politik ibarat aliran darah yang mengalirkan pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) dalam proses sistem politik, hasilnya dialirkan kembali oleh komunikasi, yang selanjutnya menjadi umpan balik (feedback) sistem politik.

Komunikasi politik berperan sangat penting dalam memelihara dan mengembangkan budaya politik yang ada dan berlaku yang telah menjadi landasan yang mantap dari suatu sistem yang mapan. Komunikasi politik mentransmisikan nilai-nilai budaya politik yang bersumber dari pandangan hidup atau ideologi bersama masyarakatnya kepada generasi baru (anak-anak, remaja, dan pemuda), dan memperkuat proses pembudayaannya dalam diri generasi yang lebih tua. (Alfian, 1991:4)

Beberapa ilmuan melihat komunikasi politik sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan politik. Oleh karena itu komunikasi politik dianggap memiliki fungsi yang sangat istimewa sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang muncul dan berkembang dalam keseluruhan proses dan perubahan politik suatu bangsa. Bahkan Plano (1982 : 24) melihat bahwa komunikasi politik merupakan proses penyebaran, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik”.

Secara formal objek komunikasi politik adalah dampak atau hasil yang bersifat politik (*political outcomes*) disamping sebagai salah satu fungsi yang menjadi syarat untuk berfungsinya sistem politik. Jika komunikasi politik dipandang sebagai jembatan metodologis antara disiplin ilmu komunikasi dan ilmu politik maka objek formal komunikasi politik juga adalah proses penciptaan kebersamaan dalam makna (*the commonness in meaning*) tentang fakta dan peristiwa politik. (Rush dan Althoff, 1971 : 46)

Komunikasi politik adalah aspek yang selalu dapat ditemui dalam setiap aktivitas politik. Sesuai pandangan ini, studi komunikasi politik selalu dapat dilihat dalam setiap studi ilmu politik, walaupun hal tersebut tidak atau kurang disadari oleh banyak orang. Seluruh interaksi yang terjadi antara sesama anggota masyarakat, antara anggota masyarakat dan elite politik, dan antara bagian-bagian elite politik disebut

komunikasi politik bila ia berhubungan atau berkaitan dengan kekuasaan politik.

Komunikasi politik di Indonesia sungguh menarik untuk diteliti karena sering tidak terduga. Keaneka ragaman masyarakat Indonesia, termasuk para politisinya, yang berbeda latar belakang sosial-budaya (ras, etnik, agama, pendidikan, status sosial, profesi sebelumnya, dsb.) tentu bersangkut paut dengan kerumitan fenomena tersebut. Memang, di negeri mana pun, baik yang sudah maju atau terbelakang, tidak ada komunikasi politik yang sama sekali terlepas dari budaya masyarakatnya (Haryanto, 2018:12).

Politik dalam pengertian yang ideal berusaha memanifestasikan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat. Pandangan ideal ini secara rasional berangkat dari logika berpikir sederhana dengan dikotomi hitam-putih; benar-salah. Aktivistik politik yang berusaha mencapai impian menciptakan tatanan masyarakat yang baik akan menempuh jalan atau cara yang menurut kategorinya baik. Namun dalam riil politik, logika berpikir demikian sungguh kenyataan yang sukar untuk diterapkan. Ini disebabkan realitas yang terjadi di masyarakat yang sangat kompleks (Makkatuo, 2021:1).

Budaya politik merupakan suatu landasan sistem dalam suatu politik yang memberikan suatu arahan dan peran politik yang dilakukan oleh struktur politik. Budaya politik ini merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Yunani. Kata "budaya"

berasal dari bahasa Sanskerta “budhayah” yang berarti akal. Sedangkan politik merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu polis dan teta yang berarti kota atau negara. Jadi, budaya politik dapat diartikan sebagai suatu landasan akal dari suatu negara.

Secara garis besar, budaya politik dapat didefinisikan sebagai suatu pola perilaku atas kebiasaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Budaya politik untuk berbangsa dan bernegara menyangkut berbagai pola perilaku masyarakat pada penyelenggaraan administrasi negara, adat istiadat, hukum, politik pemerintah, dan norma kebiasaan dari masyarakat. Dalam suatu negara pasti mempunyai budaya politik yang berbeda-beda. Terjadinya suatu perbedaan pada budaya tersebut disebabkan oleh banyak hal, antara lain kondisi, situasi, dan pendidikan masyarakat dalam suatu negara. (Makkatuo, 2021:1).

Asal mula atau lahirnya suatu budaya politik pada dasarnya berasal dari lingkungan sekitar masyarakat. Hal itu karena masyarakatlah yang memiliki hak atau wewenang dalam membuat suatu kebijakan dan mengambil keputusan. Perlu diketahui bahwa suatu budaya politik yang ada dalam suatu negara akan mengalami sebuah perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut disesuaikan dengan pemikiran masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi pada saat itu (Makkatuo, 2021:2).

Dalam perkembangannya, budaya politik di Indonesia terbagi menjadi tiga garis besar yakni: pertama, budaya politik tradisional atau keetnisan; kedua, budaya politik Islam yang mana merupakan suatu pendekatan terhadap agama Islam; ketiga, budaya politik modern yang mana merupakan suatu pendekatan untuk memajukan suatu keamanan yang stabil. Dalam studi budaya demokrasi di Indonesia, nampak selalu mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Karena itu, terjadinya suatu perubahan dalam budaya demokrasi satu negara seperti di Indonesia, sangat mempengaruhi kestabilan sistem politik nasional. Untuk itu, perlu adanya suatu studi tentang keberhasilan atau kegagalan dari suatu rezim dalam sebuah negara. Studi tersebut tentunya berkaitan erat dengan dinamika politik di Indonesia dalam mengatur ketatanegaraan suatu kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Berbicara mengenai budaya politik tidak terlepas dari perilaku politik masyarakat serta dinamika politik yang sedang berlangsung di Indonesia, khususnya dalam skala lokal. Pengkajian tentang perilaku politik yang merupakan bagian terpenting sebenarnya juga dapat dilihat dari kekentalan budaya politik suatu masyarakat, sejauh mana budaya politik itu mempengaruhi perilaku seseorang maka sejauh itu perilaku masyarakat mengikat secara keseluruhan. Dalam konteks politik lokal, terdapat beberapa budaya politik yang dapat kita temui di tengah masyarakat.

Di semenanjung Sulawesi dikenal beragam kebudayaan, dari yang paling primitif hingga yang paling modern. Di Jazirah ini didiami empat suku bangsa, yakni: Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Meskipun terdapat empat suku berbeda akan tetapi masih mempunyai ikatan kultural yang masih kuat antara suku yang satu dengan lainnya.

Walaupun masih ada ikatan kultural tetapi masing-masing suku mempunyai adat kebiasaan masing-masing yang terbangun dan terpelihara sejak dahulu kala. Untuk membedakan jatidirinya, mereka membangun sebuah peradaban kehidupan yang menjadi tolak ukur dan anutan bagi generasi selanjutnya. Para tetua masing-masing suku menurunkan tatanan dan berbagai falsafah yang kelak menjadi pegangan hidup bagi anak cucunya dalam melakoni berbagai tantangan hidup kini dan ke depannya.

Salah satu kepandaian orang-orang etnis Bugis yang banyak tersebar di hampir seluruh kepulauan nusantara kita ialah mampu dan piawai mengartikulasikan, merumuskan kalimat atau kata-kata sehingga bermakna filosofis bagi kehidupan baik sebagai pribadi maupun komunitas sosial. Kalimat atau kata-kata mereka merupakan bagian dari formulasi suatu fakta keseharian yang terjadi di sekitarnya dan bersifat antisipatif peruntukkannya bagi seseorang agar eksis dan bisa masuk ke dalam ranah kehidupan komunitas orang, etnik atau bangsa-negara lain. Satu diantara sekian banyak formulasi yang bernilai filosofis, sangat strategis, taktis, dan antisipatif adalah *Tellu*

*Cappa. Tellu Cappa* tersebut menjadi simbol nilai keunggulan yang telah mentradisi di kalangan mereka.

Filosofi ini diturunkan secara turun temurun oleh orang Bugis. Beberapa dicatat di kitab-kitab lontara yang biasa dikenal dengan *Pappaseng To Riolo*, sebagian lagi hanya sekadar petuah lisan dari orang tua ke anak-anaknya. Pappaseng to riolo merupakan salah satu bentuk sastra yang dituturkan secara lisan dan turun temurun dari generasi ke generasi, namun, setelah masyarakat Bugis mengenal tulisan, pappaseng itu pun ditulis pada daun lontar. Seiring dengan kemajuan peradaban masyarakat Bugis, kini pappaseng itu ditulis di atas kertas (dibukukan). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewariskannya kepada generasi muda.

Falsafah ini merupakan hal yang prinsipil dalam diri setiap orang Bugis yang senantiasa harus diperjuangkan dan dipelihara dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, sosial kehidupan manusia, aspek etis dalam bersikap dan aspek religius dalam hal kerohanian. Bangsa Bugis dikenal sebagai penganut adat-istiadat yang kental dan kuat.

Falsafah politik bugis *Tellu Cappa* ini pernah dipakai oleh *La Tenritata Arung Palakka* (raja Bone ke-15) sebagai strategi dalam mempersatukan kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Sulawesi dengan gerakan yang dikenal sebagai *Tana Sempugi* yang berarti negeri yang bersaudara atau bersahabat, kata *Sempugi* berasal dari kata *Cempugi*

yang artinya ari-ari atau plasenta. Hal ini dilakukan karena dalam ilmu politik orang Bugis dikenal adanya tiga macam cara atau alternatif untuk melunakkan atau untuk menyelesaikan perselisihan.

Ketiga alternatif itu dikenal dengan istilah "*tellu cappa*" Ujung lidah maksudnya diplomasi, bahwa perselisihan dapat diselesaikan melalui diplomasi. Ujung Badik bermaksud perang, bahwa perselisihan dapat diselesaikan melalui perang atau penaklukan secara kekerasan. Ujung Penis maksudnya perkawinan, bahwa perselisihan dapat diselesaikan melalui perkawinan antara kedua belah pihak yang berselisih.

Jadi bilamana alternatif pertama tidak berhasil, maka cobalah alternatif kedua dan bilamana tidak berhasil pula maka pilihlah alternatif ketiga yaitu melakukan perkawinan antara pihak pihak yang berselisih.



**Gambar 1.1 Foto Raja Bone ke 15 dan 16**

Dalam proses politik, komunikasi politik berperan penting, terutama sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan. Proses ini berlangsung di semua tingkatan masyarakat dan di setiap tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu dan kelompok. Dalam kehidupan bernegara, individu memerlukan informasi, terutama mengenai kegiatan setiap pihak menurut fungsinya.

Ketika berbicara budaya politik tentunya tidak terlepas dari pengertian budaya secara umum. Budaya politik pun sama dengan budaya yang ada di suatu negara namun pengertian budaya pada ranah politik tentunya berhubungan dengan proses dan sistem negara itu lahir. Bagaimana suatu bentuk negara lalu sistem apa yang di gunakan oleh negara tersebut merujuk bagaimana budaya masyarakat yang ada di dalam suatu negara tersebut.

Apabila budaya masyarakat masih kental akan tradisi atau ritual keagamaan/kerajaan maka biasanya sebuah wilayah tersebut masih menggunakan sistem kerajaan atau teologi untuk mengatur sebuah kumpulan masyarakat di wilayah tersebut. Tapi apabila budaya masyarakat mulai terbentuk hak hak individu lalu tingkat pendidikan umum sudah mulai berkembang biasanya sistem negaranya akan berbentuk negara yang demokrasi. Tentu model sebuah negara sangat tergantung pada sifat, karakter dari suatu tatanan masyarakat yang ada di dalamnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Sujoko dalam jurnal yang berjudul "*Komunikasi Politik Gerakan #2019GantiPresiden*" diperoleh hasil bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan komunikasi politik organik yang berbasis individual dan secara sukarela. Penyebaran gerakan ini semakin massif dengan dukungan media sosial berupa twitter dalam membangun dukungan massa politik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mattulada, dalam buku yang berjudul "*Latoa*" Penelitian ini bermaksud untuk melukiskan sistem nilai dan wujud budaya politik orang Bugis. Naskah Latoa tergolong dalam jenis Lontara', yang membedakannya dengan naskah Sure' Galigo. Naskah ini menandai periode sejarah masyarakat Sulawesi Selatan, dimulai sekitar abad XIII hingga abad XVIII. Tokoh-tokoh utama di dalamnya merupakan para raja dan rakyat yang hidup dalam suatu sistim demokrasi-monarki. Latoa sendiri diangkat dari peranan seorang bagi penasihat raja Bone, yakni Kajaolaliddo. Penulisan Latoa dimaksudkan untuk mentransformasikan "unsur-unsur lama" dari suatu kebudayaan ke dalam budaya politik masyarakat generasi berikutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan juga perbedaan dari kedua penelitian di atas. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan komunikasi politik, jenis penelitian kualitatif dan juga teknik yang digunakan dalam pengambilan data sama-sama bervariasi yaitu menggunakan observasi, wawancara serta studi

dokumentasi. Perbedaannya terdapat pada fokus dari tiap penelitian yaitu penelitian ini berfokus pada falsafah bugis *tellu cappa* yang digunakan dalam komunikasi politik.

Terdapat banyak penelitian terdahulu yang meneliti tentang komunikasi politik tapi tidak menyinggung dalam aspek kebudayaan, begitupun sebaliknya terdapat penelitian tentang kebudayaan tetapi tidak menyinggung pada aspek komunikasi politiknya dan belum ada yang menggabungkan diantara keduanya. Oleh sebab itu untuk mengetahui secara mendalam seperti apa falsafah bugis dalam perpolitikan, peneliti mengangkat judul **“Budaya Komunikasi Politik *Tellu Cappa* Dikalangan Politisi Bugis Bone Pada Era Kontemporer”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi budaya komunikasi politik *tellu cappa* dikalangan politisi Bugis Bone pada era kontemporer?
2. Bagaimana proses penerapan budaya komunikasi politik *tellu cappa* dikalangan politisi Bugis Bone pada era kontemporer?
3. Cappa apa yang paling sering digunakan dikalangan politisi Bugis Bone pada era kontemporer?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan eksistensi budaya komunikasi politik *tellu cappa* di kalangan politisi Bugis Bone pada era kontemporer.
2. Untuk mendeskripsikan proses penerapan budaya komunikasi politik *tellu cappa* dikalangan politisi Bugis Bone pada era kontemporer
3. Untuk mendeskripsikan Cappa apa yang paling sering digunakan dikalangan politisi Bugis Bone pada era kontemporer.

### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu komunikasi khususnya kajian budaya komunikasi politik
  - b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi-akademisi yang ingin melakukan penelitian komunikasi politik terutama dalam bidang budaya komunikasi politik
2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk masyarakat yang berminat dalam memahami dan mengkaji mengenai komunikasi politik khususnya budaya komunikasi politik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Hasil Penelitian**

Penelitian yang berkaitan dengan komunikasi politik yang juga pernah dilakukan oleh peneliti lain adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Husain (2011) dengan judul “Penerapan Komunikasi Politik dalam Penetapan Peraturan Daerah Kota Kendari”. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi komunikasi politik, dalam penetapan standar lokal untuk pemberantasan buta huruf Al-Qur’an. Lokasi dari penelitian ini di Kantor Inspeksi DPRD Kota Kendari. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kelompok Teori Komunikasi yang lebih ditentukan oleh Rumus Lasswell. Di Penelitian ini menggunakan informan sebanyak lima orang dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling (disengaja). Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis melalui teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi komunikasi politik dalam mengatasi buta huruf Al-Qur’an terbagi menjadi empat tahap sidang, rangkaian rapat Pansus, pleno dan sidang paripurna. Empat tahapan proses pertemuan ini tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi politik, yang didalamnya terdapat komunikator, komunikan, pesan yang disampaikan dan saluran yang digunakan untuk proses keempat adalah berjalan dengan baik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yodiansyah (2017) dengan judul “Komunikasi Politik Media Surat Kabar dalam Studi Pesan Realitas Politik pada Media Cetak Riau Pos dan Tribun Pekanbaru”. Penelitian ini membahas tentang iklim komunikasi politik dan pemilihan umum kepala negara. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan perangkat analisis framing berdasarkan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosciński yang pernah dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosciński yang terdiri dari 4 (empat) elemen makna dalam memaknai ideologi, yaitu struktur sintaksis, skrip, struktur tematik, dan retorik. Dengan analisis framing tidak hanya terbatas pada kerangka teori dalam mewacanakan bahasa politik dalam teks berita media massa. Akan tetapi, sekaligus dapat sebagai metode analisis untuk studi media massa (media studies). Temuan penelitian mencakup dinamika komunikasi politik, komunikator, pasangan kandidat, massa pendukung, media massa, dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, dan kualitas legitimasi politik menuju pemilihan umum berwibawa dan bermartabat. Ini merupakan faktor-faktor penting pendukung keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Narussa'adah, dkk (2017) dengan jurnal yang berjudul “Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Keterbukaan Ideologi” penelitian menunjukkan bahwa, komunikasi politik yang berlangsung dalam keterbukaan ideologi DPW

PKS Jawa Barat melibatkan komunikator-komunikator politik dari dalam dan luar PKS. Selain itu, komunikasi juga melibatkan kader, simpatisan, masyarakat Jawa Barat serta tamu undangan sebagai komunikannya. Komunikasi politik yang terjadi dalam keterbukaan ideologi melalui pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan dalam beberapa kegiatan DPW PKS Jawa Barat seperti; Muswil, Rakerwil dan Rakorwil. Komunikasi politik dalam keterbukaan ideologi DPW PKS Jawa Barat terjadi melalui pola komunikasi organisasi, dengan penyampaian pesan berupa pidato serta arahan. Dalam komunikasi politik, kegiatan tersebut merupakan bentuk dari retorika, propaganda, public relations, kampanye politik, serta lobi politik

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan juga perbedaan dari kedua penelitian di atas. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan komunikasi politik, jenis penelitian kualitatif dan juga teknik yang digunakan dalam pengambilan data sama-sama bervariasi yaitu menggunakan observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Perbedaannya terdapat pada fokus dari tiap penelitian yaitu penelitian ini berfokus pada falsafah bugis *tellu cappa* yang digunakan dalam komunikasi politik.

## **B. Tinjauan Konsep dan Teori**

### **1. Suku Bangsa Bugis**

Provinsi Sulawesi Selatan berpenduduk hampir enam juta orang. Mereka terdiri dari empat suku bangsa utama, yaitu suku bangsa-suku bangsa To-Ugi (Bugis), To-Mangkasara (Makassar), To-Raja (Toraja) dan To-Menre (Mandar). Suku bangsa To-Ugi atau suku Bugis, adalah suku bangsa terbesar di Kawasan Sulawesi Selatan. Jumlah mereka lebih dari tiga juta jiwa mendiami 13 di antara 24 buah Kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Luwu, Sidenreng Rappang, Bulukumba, Sinjai, Pinrang, Enrekang, Pare-Pare, Barru, Pangkajene dan Maros. Kedua kabupaten terakhir merupakan daerah-daerah peralihan yang penduduknya mempergunakan baik Bahasa Bugis maupun Makassar. Kabupaten Enrekang merupakan daerah peralihan Bugis-Toraja yang penduduknya sering juga disebut orang Duri dan Massenrengpulu', mempunyai dialek khusus, yaitu dialek Duri dan Enrekang (Mattulada, 1985 : 5).

Sekitar abad ke-XIV sampai masuknya kekuasaan colonial Belanda, orang Bugis di Sulawesi Selatan mempunyai kerajaan-kerajaan lokal merdeka yang terkenal, di antaranya ialah Tana-Luwu', Tana-Bone, Tana-Wajo, Tana-Soppeng dan Tana-Sidenreng. Kerajaan-kerajaan orang Bugis itu bersama-sama disebut Tana-Ugi. Tanah-Ugi dalam sejarahnya tak pernah mengalami keadaan

sebagai satu negara yang mempersatukan sekalian suku bangsa Bugis dalam satu pemerintahan. Persekutuan antar negara kerap kali dilakukan antara kerajaan-kerajaan Bugis, seperti antara kerajaan Tana-Luwu dengan Tana-Wajo atau antara Bone-Wajo dengan Soppeng yang disebut tellumpoccoe. Antara sesama orang Bugis di negeri-negeri Bugis itu, senantiasa terjalin hubungan kawin-mawin terutama di kalangan raja-raja dan anak-anak bangsawan mereka. Tidaklah mengherankan kalau antara raja-raja Tana-Ugi ada hubungan darah yang dekat satu sama lainnya. Di dalam wari (tata tertip garis keturunan) tiap kerajaan bugis diakui dan dihormati sesuai dengan kekuatan masing-masing, yang tertua adalah Tana-Luwu, berikutnya Tana-Bone, selanjutnya Soppeng kemudian menyusul yang lainnya. Dalam perkembangan kerajaan-kerajaan itu selanjutnya Tana-Bone dianggap sebagai kerajaan Bugis yang menjadi standar dari pola-pola kehidupan politik-ekonomi dan kebudayaan bagi kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Demikianlah maka sampai sekarang yang dijadikan Bahasa bugis standar adalah Bahasa Bugis To-Bone. Tana-Bone di masa jayanya memegang kedudukan kepeloporan di kalangan kerajaan-kerajaan Bugis dalam menghadapi tiap-tiap perkembangan yang timbul. Dengan suku bangsa Makassar yang dipimpin oleh kerajaan Makassar (Gowa) yang berkembang sebagai kerajaan maritime di bagian selatan jazirah ini, selalu timbul persaingan yang tajam, malahan

peperangan untuk memperebutkan pertuanan di Sulawesi Selatan (Mattulada, 1985 : 5).

## 2. Falsafah *Tellu Cappa*

Dalam pappasang to riolo (pesan para leluhur) dikatakan: “*Nia tallu cappa’ bokonna to lampaiyya, iyamintu: Cappa’ lila, Cappa’ laso, Cappa’ badi*”. (Ada tiga ujung yang harus menjadi bekal bagi orang yang bepergian, yaitu ujung lidah, ujung kemaluan, dan ujung badik). “*Oe ana’... a’ngu’rangiko, nia’ antu tallu cappa nuerang*” (Duhai, anak, ingatlah selalu, ada tiga ujung yang harus kau bawa sebagai bekal) Kalo dikampungnya ko orang jaga baik-baik tiga ujung itu. Kau akan jadi untung atau merugi, tergantung bagaimana kau berperilaku dengan tiga ujung yang kau bawa.”. tiga ujung yang menjadi bekal setiap orang Makassar ini sepiantas terkesan vulgar dan sadis. Namun pada hakikatnya tidak demikian. Perantau Makassar dibekali dalam dirinya tiga ‘alat’ yaitu:

1. Ujung Lidah: Kita dalam menyelesaikan masalah harus dengan jalan Diplomasi atau pembicaraan terlebih dahulu.
2. Ujung kemaluan: Bila cara 1 gagal maka bisa di lakukan dengan mengadakan perkawinanantara kedua pihak yang bertikai agar diharapkan dengan adanya perkawinan ini bisa menjalin kekerabatan lebih.

3. Ujung badik: bila cara kedua diatas gagal maka cara terakhir adalah dengan peperangan untuk mempertahankan harga diri dan menunjukkan keberanian.

Dari ketiga filosofi tersebut, kita bisa dapat melihat posisi Badik berada di bagian akhir. Ini menandakan bahwasanya Badik menjadi penopang hidup akhir episode kehidupan ketika sebuah persoalan tidak mampu lagi diselesaikan dengan jalan bijak dan beradab atau kata lain, badik bisa memaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap kejahatan dan pelindung moral atau idealisme yang melekat pada diri setiap orang, serta menjadi sandaran hidup dalam mempertahankan eksistensi diri sebagai manusia. Serta Badik juga sebagai diri kedua yang harus dimiliki setiap laki-laki Bugis Makassar saat mereka sudah baligh. Sampai pada pembahasan ini, dalam budaya Makassar dikenal pesan: "*Teyai bura'ne punna tena na ammallaki badik*" (Bukan laki-laki jika tidak memiliki badik), yang sering bersamanya, minimal ada tersimpan di rumahnya, miliknya. Merantau bagi manusia Bugis Makassar berarti penaklukan, adaptasi, atau paling rendah bertahan di negeri orang dengan hidup tidak direndahkan. Tallu Cappa adalah tahapan dalam proses penaklukan, adaptasi atau bertahan tersebut. Dalam situasi apapun, ketiga ujung ini berperan menurut situasi dan kondisi:

1. Sorongi lilanu jika keadaan masih bisa diselesaikan atau dimenangkan dengan cara berucap atau berdiplomasi dan menangkan hati mereka dengan ucapan santun dan ujaran lembut. Jika ini gagal,
2. Sorongi lasonu (sorong kemaluanmu) dengan kata lain kawini putri raja, ketua adat, atau mereka yang berpengaruh di negeri tersebut. jika ini masih juga gagal,
3. sorongi badi'nu (sorong badikmu), perangi, kuasai atau tundukkan mereka dengan perkelahian (pertempuran).

Budaya Tallu Cappa sangat dikenal di kalangan orang Bugis Makassar sebagai falsafah hidup, beriringan dengan budaya siri' na pacce (rasa malu dan kesetiakawanan) baik di tanah adat sendiri, terlebih di negeri orang. Tallu Cappa digunakan di banyak aspek kehidupan: sosial, politik, maupun ekonomi.

Satu di antara sekian banyak formulasi yang bernilai filosofis, sangat strategis, taktis, dan antisipatif adalah *Tellu Cappa*. *Tellu Cappa* tersebut menjadi simbol nilai keunggulan yang telah mentradisi di kalangan masyarakat bugis.

Secara etimologis, *Tellu* berarti tiga dan *Cappa* berarti ujung. Secara terminologis ialah tiga rangkaian ungkapan filsofi yang menjadi prinsip hidup dan dipedomani oleh seseorang bila yang bersangkutan ingin hidup dan kehidupannya memperoleh

pengakuan, eksistensinya diakui serta bisa memengaruhi orang lain.

Pertama, *Cappa lila* yang berarti ujung lidah yang berarti dalam proses berinteraksi antar sesama dapat mempergunakan dan fasih secara lisan untuk berucap atau mengucapkan sesuatu agar mengesankan sehingga bisa menjadi sebab seseorang atau pihak siapa pun bisa dipengaruhi atau terpengaruh oleh karena ucapan atau ungkapan-ungkapan yang terucapkan.

Kedua, *Cappa Kawali* yang berarti ujung badik, atau benda-benda apa saja berjenis tajam sehingga bisa dipakai untuk menusuk, membelah atau memotong sesuatu (orang atau benda lain).

Dan ketiga, *Cappa Laso*, yang berarti ujung kemaluan (khususnya bagi jenis pria). *Cappa Laso* ini merupakan salah satu cara untuk masuk, memengaruhi, dan bahkan menguasai seseorang atau keadaan bila kedua *cappa* sebelumnya dinilai tidak efektif memahami sesuatu. *Cappa Laso* ini ditujukan khususnya kepada kaum pria agar bisa menikahi salah satu putri anggota keluarga orang lain. Sebab dengan cara menikahi salah satu anggota keluarga orang lain maka dengan sendirinya seseorang akan lebih mudah, gampang dan cepat diterima keberadaannya serta besar kemungkinan akan menerima apa saja yang dikehendaki atau dimaksudkan.

## **2.1. Politik Penguasaan Arung Palakka Menggunakan Tellu Cappa**

Pada abad-17, akhir dari perjalanan panjang Perang Makassar, Perjanjian Bongaya menjadi dasar damai dari kebebasan Kerajaan lokal Bone dan Soppeng. Peran La Tenritatta Datu Marioriwawo Arung Palakka bersama sekutunya berhasil mengakhiri belenggu kekuasaan Kerajaan Gowa pada tanggal 18 November 1667. Perjanjian damai ini kemudian dikenal orang Makassar sebagai Cappaya ri Bungaya atau orang Bugis Ceppa-eri Bungaya dan orang Belanda menyebutnya Het Bongaisch Verdrag.

Setelah perjanjian bongaya ditandatangani, kehidupan politik kerajaan lokal mengalami perubahan dominasi politik kekuasaan di Jazirah Sulawesi bagian selatan. Sebelumnya kerajaan Gowa mendominasi perpolitikan kerajaan, lambat laun berubah haluan dibawah pengaruh kekuasaan Bugis, Bone dan Soppeng dibawah pengaruh La Tenritatta Arung Palakka serta sekutunya Verenigde Oost Companigde (VOC).

Dengan berakhirnya perang tersebut bukanlah berarti bahwa semua masalah di Sulawesi Selatan ini telah selesai dan berkurang, tetapi justru masalah ini semakin banyak dan bertumpuk untuk segera diselesaikan, utamanya oleh La Tenritattta Arung Palakka Datu Marioriwawo sendiri.

Setelah perjanjian dan perang yang membantu Belanda tersebut, La Tenritatta Arung Palakka kemudian menata kembali pemerintahan dengan membangun hubungan baik dengan penguasa-penguasa di kalangan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.

Politik penguasaan dibawah kepemimpinan La Tenritatta Arung Palakka mulai dilancarkan diseluruh wilayah Sulawesi. Dari sekian banyak masalah dan tugas yang harus di selesaikan oleh La Tenritatta Arung Palakka maka yang paling berat adalah mewujudkan perdamaian di antara semua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan ini. Pengalaman dan pengamantannya terhadap situasi dan kondisi yang terjadi sejak dahulu hingga saat itu, La Tenritatta Arung Palakka berkesimpulan bahwa jalan terbaik menuju terciptanya kedamaian dan kerukunan antar kerajaan adalah “mempersaudarakan” semua kerajaan yang ada, dalam suatu wadah yang disebutnya Tana Sempugi.

Hal ini dilakukan karena sebagaimana diketahuinya bahwa dalam ilmu politik orang Bugis di kenal adanya tiga macam cara atau alternatif untuk melunakkan atau untuk menyelesaikan perselisihan. Ketiga alternatif itu di kenal dengan istilah “*tellu cappa*” atau “tellu ujung”, yaitu pertama *cappa lila* (ujung lidah), kedua *cappa badik* (ujung badik), ketiga *cappa laso* (ujung zakar). Ujung lidah maksudnya diplomasi, bahwa perselisihan dapat di selesaikan

melalui diplomasi. Ujung tombak bermaksud perang, bahwa perselisihan dapat diselesaikan melalui perang atau penaklukan secara kekerasan. Ujung zakar maksudnya perkawinan, bahwa perselisihan dapat di selesaikan melalui perkawinan antara kedua belah pihak yang berselisih. Jadi bilamana alternatif pertama tidak berhasil, maka cobalah alternatif kedua dan bilamana tidak berhasil pula maka pilihlah alternatif ketiga yaitu melakukan perkawinan antara pihak pihak yang berselisih.

Dari pengalamannya ternyata alternatif pertama dan kedua tidak memberikan hasil yang memuaskan, bahkan hanya membawa malapetaka yang berkepanjangan, maka akan dicobanya dengan alternatif ketiga. La Tenritatta Arung Palakka yakin, bahwa hanyalah dengan mewujudkan tana sempugi, kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan ini akan menjadi tentram dan damai, Karena dengan mewujudkannya tana sempugi, maka di seluruh kerajaan akan terjalin tali persudaraan yang sangat kuat, yang akan menimbulkan rasa solidaritas yang sangat dalam di antara mereka.

La Tenritatta Arung Palakka mencoba membangun satu ikatan yang kuat antar kerajaan untuk menciptakan iklim sosial dan politik yang kondusif, guna membawa wilayah ini dalam satu kehidupan yang lebih harmonis. Salah satu jalan yang dilakukan adalah melakukan politik mawin-kawin atau politik perkawinan.

Untuk mewujudkan cita-cita mempersaudarakan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, La Tenritatta Arung Palakka melakukan suatu cara dengan politik perkawinan antara kerajaan-kerajaan tetangga, baik itu kawan semasa perjuangan maupun bekas musuh bebuyutan selama peperangan. Dalam melakukan usaha tersebut, dia mulai mempraktekkan pada dirinya sendiri dengan mengawini beberapa putri bangsawan dari kerajaan kerajaan tetangga.

Semula La Tenritatta Arung Palakka berharap punya putra mahkota dari permainsurinya I Mangkawani Daeng Talele Karaeng Bantaeng putri dari I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Patingalloang Mangkubumi Kerajaan Gowa dan demikian pula dari perkawinannya dengan We Adda putri La Tenri Bali Datu Soppeng IV serta dari Daeng Marannu Karaeng Langelo putri Karaeng Bontomarannu. Namun ternyata harapannya itu menjadi sirna karena tidak ada satupun diantara istri-istrinya itu yang memberinya keturunan. Walaupun mempunyai banyak istri tetapi yang hanya di kenal dan paling disayangi adalah istrinya yang bernama Daeng Talele. Dari beberapa perkawinan beliau tidak dikaruniai satupun keturunan, sehingga hilanglah harapan untuk mendapatkan anak yang kelak menjadi raja dan meneruskan cita-citanya.

Walaupun tidak mendapatkan anak tetapi ia tetap berusaha untuk mendapatkan anak walaupun bukan dari keturunan sendiri, seperti dengan mengawinkan saudara saudaranya dan kemanakan-kemanakan dengan raja raja yang berkuasa, atau dengan bangsawan bangsawan, Dari hasil perkawinan tersebut harapannya dapat tercapai karena mendapatkan anak anak dari hasil perkawinan saudara saudaranya yang akan dikaderisasi sebagai calon raja dan meneruskan cita cita La Tenritatta Arung Palakka. Perkawinan yang paling menunjang cita-citanya adalah perkawinan adik perempuannya yang bernama We Mappolobombang Maddanreng Palakka dinikahkan dengan La Pakokoe Arung Timurung anak dari La Maddaremmeng. Pada mulanya Arung Timurung tidak ingin menikah, karena perkawinan itu tidak serasi dimana calon istri sudah tua (tidak lagi haid) dan Arung Timurung masih muda, tetapi karena pertimbangan La Tenritatta Arung Palakka yang mengandung maksud baik akhirnya Arung Timurung mengerti dan perkawinan pun dapat berlangsung.

Kalau melihat usia dari adik La Tenritatta Arung Palakka harapan mendapatkan keturunan sebenarnya sangat tipis, tetapi karena kekuasaan tuhan dan mungkin keinginan La Tenritatta Arung Palakka itu merupakan rahmat dari yang kuasa sehingga saudaranya dapat melahirkan seorang anak. Anak tersebut

bernama La Patau yang kelak menjadi calon raja dan “pemeran utama” dalam meneruskan cita-citanya, karena dalam diri kemenakannya itu terdapat potensi besar dalam memberikan keturunan yang dari padanya akan lahir anak-anak dari berbagai kerajaan yang kelak menduduki tahta kerajaan.

Pada masa kekuasaan La Tenritatta Arung Palakka, Raja Bone XVI, dilakukan perkawinan politik. La Tenritatta Arung Palakka yang tidak mempunyai keturunan telah memilih kemenakannya La Patau Matanna Tikka sebagai pewaris tahta Kerajaan Bone. Agar bangsawan Bone tidak terbatas berkuasa atas wilayah Bone saja, perkawinan politik dibangun dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Misalnya dengan Gowa, Luwu, dan Soppeng. Perkawinan politik ini memberi peluang besar untuk elite bangsawan Bone untuk berkuasa atas kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Bukti legitimasi kekuasaan tersebut dapat dilihat dalam meminang calon istri bagi La Patau disertai dengan syarat, bahwa anak yang nantinya lahir dari perkawinan itu mutlak menjadi raja di negeri ibunya, Ternyata lamaran dan syarat itu tidak ada yang berani menolaknya, walaupun itu bekas musuhnya dalam peperangan. Dari hal tersebut membuktikan bahwa La Tenritatta Arung Palakka mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kepemimpinan yang karismatik, sehingga kerajaan kerajaan di

Sulawesi Selatan menghormati dan mencintainya sebagai penguasa tunggal.

## **2.2. Penaklukan Kerajaan Bima Oleh Kerajaan Gowa menggunakan Tellu Cappa**

Pada pertengahan abad ke-17, Kerajaan Gowa melakukan ekspedisi militer dalam menaklukan kekuasaan Raja Bima Manuru Salisi dan membantu Abdul Kahir merebut kembali tahtanya. Ekspedisi militer itu sesungguhnya tidak terlepas dari falsafah tiga ujung yang menjadi falsafah masyarakat Gowa selama berabad-abad lamanya. Filosofi itu dikenal dengan *Tellu Cappa* yaitu Cappa Lila atau ujung lidah, Cappa Buto atau ujung kemaluan dan Cappa Badik atau ujung badik.

Pada tahun 1605 Raja Gowa I Mangari Daeng Manrabbia Sultan Alauddin I Tuminanga ri Gaukanna memeluk Islam dan Gowa secara resmi menjadi Negara Islam. Beberapa tahun kemudian Aluiddin mengirim para mubaliq untuk berdakwah dan menyiarkan agama Islam di Bima yang pada saat itu tengah dilanda kemelut politik perebutan kekuasaan. Falsafah Cappa Lila (ujung lidah) dilakukan oleh kerajaan Gowa, namun tidak mampu menundukkan hati Raja Salisi untuk memeluk Islam.

Jalur diplomasi dan dakwah gagal dilakukan kepada kerajaan Bima. Para mubaliq kemudian menemui Jena Teke Abdul

Kahir dan mendakwahkan Islam serta menyampaikan komitmen Alauddin untuk membantu perjuangan Abdul Kahir merebut tahta. Akhirnya Abdul Kahir memeluk Islam dan Menyusun kekuatan di Balla Lompoa. Untuk mengikat hubungan kekerabatan dan kekeluargaan antara Gowa dan Bima, maka politik ranjang dengan ujung kedua pun dijalankan yaitu Cappa Buto atau ujung kemaluan. Alauddin menikahkan Abdul Kahir dengan Daeng Sikontu, adik dari permaisurinya. Melalui Cappa Buto, Abdul Kahir telah menjadi keluarga besar kerajaan Gowa dan lahirlah Sang I Ambela ( Sultan Abdul Khair Sirajudin) yang kelak menjadi Sultan Bima kedua pada tahun 1627.

Di Bima, kekuasaan Salisi tak terkalahkan. Salisi semakin berkuasa. Akhirnya Gowa mengeluarkan ujung yang terakhir yaitu Cappa Badik (ujung badik). Pada tahun 1632 Bima memberontak dengan bantuan Raja Dompu. Menurut catatan Pelabuhan Batavia, pada tahun 1633, sebuah kapal Belanda yang baru tiba di Bima melihat “semua sawah, rumah, dan desa dibakar dan dihancurkan oleh Armada Makassar sebesar 400 perahu dan ribuan orang yang disuruh oleh Raja Makassar memulihkan di atas tahta iparnya baru digulingkan oleh rakyatnya dan dibuang ke pulau gunung Api. “(Henry Chambert-Loir & Siti Maryam R.Salahuddin, BO Sangaji Kai : XIX).

Gowa mengirim ekspedisi besar-besaran dibawah pimpinan Datu Patiro Bone dan La Mbila (Abdullah Tayyib, BA.114). Hal ini dilakukan sebagai upaya terakhir setelah dua ujung itu tidak membuahkan hasil. Pertempuran hidup dan mati pun berkecambuk di Bima. Cappa Badik berhasil dan Bima menjadi Negara Islam sejak 05 Juli 1640. Setelah itu ada delapan generasi kesultanan Bima yang menjalin politik Ranjang dengan bangsawan Gowa.

### **3. Budaya**

Ada beberapa pengertian budaya menurut beberapa ahli salah satu diantaranya adalah tokoh terkenal Indonesia yaitu Koentjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat (2000: 181) kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa sansakerta "buddhayah", yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti "budi" atau "akal". Jadi Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai "daya budi" yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu.

Koentjaraningrat menerangkan bahwa pada dasarnya banyak yang membedakan antara budaya dan kebudayaan, dimana budaya merupakan perkembangan majemuk budi daya, yang berarti daya dari budi. Pada kajian Antropologi, budaya dianggap merupakan singkatan dari kebudayaan yang tidak ada perbedaan dari definsi. Jadi kebudayaan atau disingkat budaya, menurut

Koentjaraningrat merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Menurut Liliweri (2002: 8) kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Lebih lanjut, Taylor dalam Liliweri (2002: 62) mendefinisikan kebudayaan tersusun oleh kategori-kategori kesamaan gejala umum yang disebut adat istiadat yang mencakup teknologi, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, estetika, rekreasi dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Hawkins (2012) mengatakan bahwa budaya adalah suatu kompleks yang meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat-istiadat serta kemampuan dan kebiasaan lain yang dimiliki manusia sebagai bagian masyarakat. Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan. Linton

dalam Ihromi (2006: 18). Jadi kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.

Berdasarkan paparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa definisi budaya adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti culture, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.

Edwar T. Hall dalam (Liliweri, 156:2013) mengaitkan komunikasi dengan budaya memiliki hubungan sangat erat. Menurutnya, *communication is culture and culture is communication*. Hall terlebih dahulu membedakan budaya konteks tinggi HCC (*high context culture*) dengan budaya konteks rendah LCC (*low context culture*).

HCC ditandai dengan komunikasi tinggi, yang artinya kebanyakan pesannya bersifat implisit, tidak langsung dan tidak terus terang. Pesan yang sebenarnya mungkin tersembunyi dalam perilaku nonverbal pembicara seperti intonasi suara, gerakan tangan, postur tubuh, ekspresi wajah, tatapan mata, atau bahkan

kontak fisik. Pernyataan verbalnya bisa berbeda dengan pernyataan nonverbalnya.

Sebaliknya, LCC ditandai dengan komunikasi konteks rendah, yang artinya pesannya bersifat eksplisit, gaya bicara langsung, lugas dan berterus terang. Para penganut budaya konteks rendah ini mengatakan apa yang mereka maksudkan dan memaksudkan apa yang mereka katakan. Misalnya, jika anggota budaya konteks rendah mengatakan “yes” maka itu berarti mereka benar-benar menerima atau setuju.

Dengan demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik materiel maupun nonmateriel. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.

### **3.1. Perwujudan Kebudayaan**

Beberapa ilmuwan seperti Talcott Parson (Sosiolog) dan A.L. Kroeber (Antropolog) menganjurkan untuk membedakan wujud kebudayaan secara tajam sebagai suatu sistem. Di mana wujud kebudayaan itu adalah sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Demikian pula J.J. Honigmann dalam bukunya *The World of*

Man (1959) membagi budaya dalam tiga wujud, yaitu: (1) ideas, (2) activities, and (3) artifact. Sejalan dengan pikiran para ahli tersebut, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan itu dibagi atau digolongkan dalam tiga wujud, yaitu:

**1. Wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan.**

Wujud tersebut menunjukkan wujud ide dari kebudayaan, sifatnya abstrak, tak dapat diraba, dipegang, ataupun difoto, dan tempatnya ada di alam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ideal ini disebut pula tata kelakuan, hal ini menunjukkan bahwa budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Kebudayaan ideal ini dapat disebut adat atau adat istiadat, yang sekarang banyak disimpan dalam arsip, tape, dan komputer.

Kesimpulannya, budaya ideal ini adalah merupakan perwujudan dan kebudayaan yang bersifat abstrak.

**2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.**

Wujud tersebut dinamakan sistem sosial, karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasikan karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dan berhubungan serta bergaul satu dengan lainnya dalam masyarakat. Lebih jelasnya tampak dalam bentuk perilaku dan bahasa pada saat mereka berinteraksi dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat.

Kesimpulannya, sistem sosial ini merupakan perwujudan ke budayaan yang bersifat konkret, dalam bentuk perilaku dan bahasa.

### **3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.**

Wujud yang terakhir ini disebut pula kebudayaan isik. Dimana wujud budaya ini hampir seluruhnya merupakan hasil fisik (aktivitas perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat). Sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto yang berwujud besar ataupun kecil. Contohnya: Candi Borobudur (besar), kain batik, dan kancing baju (kecil), teknik bangunan, misalnya, cara

pembuatan tembok dengan fondasi rumah yang berbeda bergantung pada kondisi.

Kesimpulannya, kebudayaan fisik ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret, dalam bentuk materi/artefak.

#### **4. Budaya Politik**

Pada hakikatnya setiap orang berbudaya dan memiliki kebudayaannya sendiri. Di Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui memiliki beragam kebudayaan di setiap daerahnya. Setiap orang yang berbudaya pasti menunjukkan siapa jati dirinya bahwa darimana ia berasal. Jelas bahwa budaya menunjukkan siapa seseorang sebenarnya di hadapan orang lain, dan setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing (Sutrisno dan Hendar, 2005).

Perumusan budaya dari sudut psikologi menyatakan bahwa budaya merupakan bagian dari perilaku manusia yang di pelajari. Dalam hal ini, maka pengertian di pelajari sangat penting. Kiranya semua pihak mengakui, bahwa apapun yang menjadi bagian yang membentuk kebudayaan, bagian tersebut beralih dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau tidak, maka perlu di asumsikan bahwa manusia tidak hanya harus mempunyai dorongan untuk membentuk kebudayaan, akan tetapi perilakunya mengikuti garis-garis tertentu (Soekanto, 1993).

Budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Menurut (Rusadi Kantaprawira 2006), budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya (Rusadi Kantaprawira 2006).

Kegiatan politik warga negara, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik. Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat di pengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan dan kepemimpinan. Dengan kata lain, budaya politik adalah suatu bangsa yang dapat didefinisikan sebagai pola distribusi orientasi-orientasi yang dimiliki oleh anggota masyarakat terhadap objek-objek politik atau bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan

politik di antara masyarakat itu. Lebih jauh di nyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik (Rusadi Kantaprawira 2006).

Politik dimaknai sebagai aktivitas masyarakat dalam suatu bangsa dengan tujuan membuat, mempertahankan, serta memperbaiki peraturan sebagai alat dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. dengan tidak terlepas atas peristiwa konflik dan kerja sama (Heywood, 2019). Tujuan di atas dapat di peroleh melalui sebuah instrumen kekuasaan yang berfungsi dalam menetapkan alokasi sumber daya yang dimiliki. Kekuasaan yang di maksud merupakan sebuah kemampuan individu dan kelompok dalam mempengaruhi perilaku individu bahkan kelompok tentu saja sesuai dengan si pembuat perintah atau pemilik kekuasaan tersebut (Budiardjo, 2017). Sementara itu, budaya politik berkaitan dengan seluruh pengetahuan, emosional, bahkan penilaian etika moral langsung yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Suryo, 2015).

Budaya politik juga berkaitan dengan orientasi politik dan sikap warga negara dalam sistem politik, serta sebuah sikap dari warga negara terhadap sistem tersebut, dengan kata lain budaya

politik yang berlaku di sejumlah negara memiliki konsekuensi yang signifikan untuk dukungan public (Harring et al, 2019). Budaya politik juga berkaitan dengan proses demokrasi, di mana corak politik akan menentukan bagaimana masyarakat di dalamnya berperan dalam kehidupan politik termasuk di dalam proses pemilihan umum (Voinea, 2020). Budaya politik juga memiliki peran penting dalam penentuan kebijakan pemerintah (Kagan et, 2018).

Pengetahuan dan pemahaman akan politik, proses-proses yang ada di dalamnya tidak terlepas dari lingkungan di mana masyarakatnya tinggal dan melakukan sosialisasi secara rutin. Dalam konteks Indonesia, budaya politik merupakan realitas yang dianggap paling kuat dan fundamental dalam sistem politik (Gatara & Said, 2007). Terlebih bahwa budaya masyarakat Indonesia khususnya budaya antar etnis yang demikian heterogen dan kompleks dengan fragmensinya menghasilkan heterogenitas etnis dan budayadan menjadikannya sebagai negara di dunia yang paling plural dengan bahasapaling beragam (Lukas, 2002).

Secara umum terdapat 2 (dua) kategori untuk dapat menjelaskan eksistensi budaya politik dalam sebuah entitas negara atau unit pemerintahan yang lebih kecil yaitu konsep budaya politik yang di pahami secara struktural yang melihat budaya politik sebagai fenomena dan konsep budaya politik yang di pandang dalam makna fungsional dan instumental yang menjadi determinan

dalam perilaku memilih (Marijan,1999). Dengan demikian relasi budaya politik dengan perilaku politik memilih menjadi lebih jelas dalam konteks ini.

Pureklolon (2021). Budaya politik jika dilaksanakan dalam ketentuanketentuan yang benar akan berdampak terhadap berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan dan lain-lain :

1. Dampak budaya politik terhadap perekonomian Budaya memiliki peranan yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara karena terkait dengan pembentukan trust di dalam kelompok. Indonesia mempunyai tingkat heterogenitas yang tinggi sehingga di dalam kehidupan perekonomian akanmembutuhkan biaya transaksi yang di tanggung oleh masyarakat karena adanya perbedaan budaya tersebut.
2. Budaya Politik Terhadap Pendidikan Budaya politik terhadap pendidikan dapat di atasi dengan pendidikan yang formal maupun nonformal, maka pemikiran seseorang dapat menjadi lebih terbuka dan lebih toleran terhadap perbedaan.

Pureklolon (2021). untuk mengetahui karakter budaya politik suatu bangsa,dapat di ukur melalui beberapa hal, yakni:

1. Tingkat pengetahuan umum masyarakat mengenai sistem politik negaranya. Contohnya pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negara.

2. Pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah dalam membuat kebijakan.
3. Pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang mencakup opini atau pendapat dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah.
4. Seberapa besar tingkat partisipasi politik warga masyarakat serta sejauh mana pemahamannya tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

Berdasarkan orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan politiknya atau budaya politiknya, Almond dan Verba membaginya dalam tiga tipe budaya politik, yakni budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek dan budaya politik partisipan. Yang penting dari klasifikasi tersebut adalah kepada objek politik apa, aktor politik individual yang berorientasi, bagaimana mereka mengorientasikan diri, dan apakah objekobjek politik tersebut terlibat secara mendalam dalam pembuatan kebijaksanaan yang bersifat ke atas atau dalam arus pelaksanaan kebijaksanaan yang bersifat ke bawah. (Almond dan Verba,) Hasilnya adalah klasifikasi tiga tipe ideal budaya politik, yaitu sebagai berikut :

### **1. Budaya Politik Parokial**

Budaya politik parokial adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang

disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan-harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik. Budaya politik parokial yang kurang lebih bersifat murni merupakan fenomena umum yang biasa di temukan di dalam masyarakat-masyarakat yang belum berkembang, di mana spesialisasi politik sangat minim (Almond dan Verba 1984).

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil dan sederhana, sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki pengkhususan tugas. Tetapi peranan yang satu di lakukan bersamaan dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik di lakukan bersamaan dengan peranannya baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan / spiritual. Selain itu, dalam budaya politik parokial juga menyatakan apa harapanharapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh system politik. Masyarakat dengan budaya politik parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik (Almond dan Verba, 1984).

Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan Parokial apabila frekuensi orientasi

mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. Dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun, yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religious (Sumartono, 2018).

Dalam penjelasan yang luas bahwa budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah. Dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasi dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik. Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik (Mustanir dan Jaya, 2016).

Budaya politik parokial, masyarakat masih memiliki ciri tradisional yaitu peranan politik seperti partisipasi politik yang rendah, yang dipengaruhi oleh faktor kognitif dari masyarakat meliputi tingkat pendidikan yang rendah. Budaya politik ini ditandai dengan tidak berkembangnya harapan akan perubahan dalam sistem politik tersebut (Ulzikri, Cahyadi dan Indrajat, 2021).

## **2. Budaya Politik Subjek / Kaula**

Masyarakat yang berbudaya politik subjek/kaula, mereka memang memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (input) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (output) masih sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara efektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggaan terhadapnya atau sebaliknya tidak menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang absah. Namun demikian, posisinya sebagai subjek (kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif. Di yakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik (Almond dan Verba, 1984). Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima segala keputusan dan

kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan rakyat memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan/kebijakan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubah-ubah, dikoreksi apalagi ditentang. Budaya politik ini ditemukan dalam masyarakat yang orang-orangnya secara pasif patuh terhadap pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik atau memberikan suara dalam pemilihan. Dalam budaya ini tidak dikembangkan kemampuan responsif, sehingga masyarakat enggan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Budaya politik subjek muncul jika orientasi efektif saja yang kuat (Budi Winarno, 2008). Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek/kaula, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik yang rendah dan keberdayaan politik yang rendah sehingga sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi.

Budaya politik kaula (subjek), yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subjek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai

penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada di tunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Sumartono, 2018).

Budaya politik kaula lebih rendah satu derajat dari budaya politik partisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap Negara. Mereka akan merasa tidak nyaman jika membicarakan masalahmasalah politik (Mustanir dan Jaya (2016).

Budaya politik kaula ditandai dengan. kesadaran masyarakat dalam memberikan input politik nihil dan pasif bahkan cenderung lemah. Sebenarnya telah memiliki kesadaran adanya otoritas dari

pemerintah. Masyarakat juga sudah aktif memiliki orientasi suka dan tidak suka terhadap pemerintah. Namun, masyarakat masih berkeyakinan bahwa andilnya dalam aktivitas politik tidak memiliki pengaruh untuk perubahan dalam system politik (Ulzikri, Cahyadi dan Indrajat, 2021).

### **3. Budaya Politik Partisipan**

Budaya politik partisipan adalah suatu budaya politik dimana warga masyarakatnya sudah memiliki orientasi politik yang secara eksplisit di tujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik, dan administratif. Dengan perkataan lain, perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi. Dalam budaya politik partisipasi dirinya atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya. Masyarakat juga merealisasikan dan mempergunakan hak-hak politiknya. Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partisipan tidak begitu saja menerima keputusan politik (Almond dan Verba, 1984). Hal ini karena masyarakat telah sadar bahwa betapapun kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu (Almond dan Verba, 1984).

Budaya politik partisipan hidup dalam masyarakat yang orang-orangnya melibatkan diri dalam kegiatan politik atau paling tidak

dalam kegiatan pemberian suara, dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik. Budaya politik partisipan muncul jika orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif dikembangkan secara maksimal dan seimbang (BudiWinarno,2008).

Dengan budaya politik partisipan, maka kerja system politik demokrasi dapat di kembangkan karena pada budaya politik ini warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya sikap saling percaya (trust) antar warga negara. Oleh karena itu, dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik (BudiWinarno,2008).

Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung diarahkan pada peran

pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak (Sumartono, 2018).

Budaya politik partisipan atau partisipatif adalah suatu bentuk budaya yang berprinsip bahwa warga masyarakat di orientasikan untuk menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari keseluruhan sistem, struktur, administrasi dan proses politik pemerintahan. Orientasi warga terhadap objek politik tak hanya berupa input seperti ikut pemilu dan sebagainya, tetapi juga output, seperti menolak atau menerima kebijakan pemerintah, mengkritisi pemerintah dan sebagainya (Mustanir dan Jaya, 2016).

Budaya politik partisipan biasanya ada pada kondisi masyarakat di mana setiap individunya telah mampu melibatkan dirinya dalam aktivitas kehidupan politik, misalnya ikut memilih saat pemilu. Budaya politik ini memiliki ciri orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif yang terbilang baik dan masyarakat telah mampu berperan secara aktif, sebagai akibat munculnya sikap saling percaya di antaranya warga negaranya, sehingga kehidupan demokrasi berkembang dengan baik (Ulzikri, Cahyadi dan Indrajat, 2021).

## 5. Komunikasi

Komunikasi mengandung pengertian bersama-sama yakni common. Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yaitu communico yang berarti “pemberitahuan atau pertukaran”. Kata sifat communis, yang bermakna. umum atau bersama. Sederhananya, komunikasi dapat diartikan sebagai proses yang digunakan individu untuk bertukar informasi dari satu pihak kepada pihak lain yang disampaikan menggunakan simbol-simbol Cangara (2011: 19). Salah satu cara untuk memahami komunikasi adalah dengan memahami pengertian komunikasi itu sendiri. Para ilmuwan mendefinisikan komunikasi menurut sudut pandang mereka masing-masing. Hal ini dapat dimengerti karena ilmu komunikasi dikembangkan oleh ilmuwan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda.

Pengertian komunikasi menurut beberapa ahli: Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam Cangara (1998: 20). Bernard Berelson dan Gary A. Steiner menerangkan bahwa Komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya, dengan menggunakan simbol-simbol, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasa disebut komunikasi Mulyana

(2005: 68). Shannon dan Weaver menjelaskan komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak disengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi Cagara (1998: 20).

Komunikasi dapat membantu dan mempermudah seseorang dalam menyampaikan ide, perencanaan yang sesuai kebutuhan, dan mengimplementasi sesuatu yang baru untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi adalah aktifitas pertukaran informasi secara timbal balik diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pengembangan pembangunan mulai perencanaan sampai implementasi untuk bisa diterapkan untuk kemakmuran.

### **5.1. Tujuan Komunikasi**

Setelah proses komunikasi berlangsung apa yang disampaikan komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Tugas komunikator adalah harus menjelaskan pesan utama dengan jelas dan sedetail mungkin orang lain bisa memahaminya, dan yang mejadi tujuannya adalah: 1). Perubahan sikap, 2). Mengubah opini dan pandangan, 3). Mengubah prilaku, 4). Mengubah masyarakat, Effendy (2007: 55) dengan melakukan komunikasi, setiap individu dapat memahami individu lainnya dengan kemampuan mendengar tentang suatu hal yang sedang dibicarakan orang lain.

Supaya apa yang disampaikan dapat diterima orang lain. Komunikasi serta pendekatan persuasif adalah cara agar sebuah gagasan mudah diterima oleh orang lain yang bertujuan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal sesuai dengan keinginan komunikator.

## **5.2. Bentuk-Bentuk Komunikasi**

Menurut Effendy (2007: 53) bentuk-bentuk komunikasi berdasarkan situasi komunikasi maka diklasifikasikan sebagai berikut:

### **1. Komunikasi Pribadi (Personal Communication)**

Komunikasi ini dibagi dua intrapersonal dan interpersonal: Intrapersonal sering disebut juga komunikasi intrapribadi, secara harfiah dapat diartikan sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi yang terjadi dalam diri individu ini juga berfungsi untuk mengembangkan kreatifitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri serta meningkatkan kematangan berfikir sebelum mengambil suatu keputusan. Komunikasi ini akan menjadikan seseorang agar tetap sadar akan kejadian disekitarnya. Sedangkan komunikasi Interpersonal ialah komunikasi antara dua orang dan terjadi kontak langsung dalam percakapan. Komunikasi ini juga dapat berlangsung dengan berhadapan muka atau

melalui media komunikasi antara lain dengan melalui pesawat telfon, atau radio.

## 2. Komunikasi Kelompok (*Group Communication*)

Komunikasi kelompok ialah interaksi tatap muka antara tiga orang atau lebih dengan tujuan berbagi informasi, pemecahan masalah yang mana anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi masing-masing anggota lain secara tepat yang memiliki rencana yang sama untuk mencapai tujuan kelompok. Komunikasi kelompok terbagi dua yaitu kelompok kecil (ceramah, forum, symposium, seminar, diskusi panel dan lain lain) dan kelompok besar (*large group communication/ public speaking*).

## 3. Komunikassi Massa (*Mass Communication*)

Komunikasi Massa ialah suatu proses dimana suatu organisasi memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas, atau suatu proses komunikasi dimana pesan dari media dicari digunakan dan dikonsumsi oleh audiens. Oleh karena itu, komunikasi massa mempunyai karekteristik utama yaitu media massa sebagai alat penyebaran pesannya. Komunikasi massa ini terbagi dua yakni komunikasi media massa cetak dan komunikasi media massa elektronik.

#### 4. Komunikasi Medio (*Medio Communication*)

Komunikasi yang dilakukan dengan media alat tertentu seperti surat, telepon, pamphlet, poster, spanduk, dan lain-lain.

### 5.3. Fungsi Komunikasi

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang harus berinteraksi melalui komunikasi, komunikasi berfungsi sebagai penyampai pesan dari seseorang kepada orang lain menggunakan lambang sebagai media, diantaranya adalah melalui: Menurut Effendi (dalam Cangara 2017: 42) ada empat fungsi utama komunikasi yaitu:

1. *To inform* (menginformasikan). Yakni memberikan informasi kepada orang lain tentang suatu peristiwa, masalah, pendapat, pikiran, segala tingkah laku orang lain dan apa yang disampaikan orang lain.
2. *To Educate* (mendidik). Yakni sebagai sarana pendidikan. Karena melalui komunikasi, manusia dalam suatu lingkungan masyarakat dapat menyampaikan segala bentuk pengetahuan, ide, gagasan kepada orang lain sehingga orang lain dapat menerima segala bentuk informasi yang kita berikan.

3. *To Entertain* (menghibur). Komunikasi juga berfungsi untuk menghibur orang lain dan menyenangkan hati orang lain.
4. *To Influence* (mempengaruhi). Selain sebagai sarana untuk menyampaikan pendidikan, informasi dan sebagai sarana dalam menghibur orang lain, komunikasi juga berfungsi untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Saling mempengaruhi segala bentuk sikap dan perilaku orang lain agar mengikuti apa yang diharapkan.

#### **5.4. Komponen-Komponen Komunikasi**

Menurut Haroll D. Lasswell (dalam Ruliana, 2016: 3) menyatakan komponen komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan yakni: (a) *Who (communicator, source, sender)*; (b) *Says What (Message)*; (c) *In Which Channel (channel, media)*; (d) *To Whom (communicant, communicate, receiver, recipient)*; (e) *Effect (effect, impact, influence)*. Berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui suatu media yang menimbulkan efek (Cangara, 2011: 22).

**Komunikator:** Komunikator adalah seseorang yang menyampaikan pesan, dapat berupa seseorang yang sedang

menulis atau berbicara, berupa kelompok orang ataupun organisasi komunikasi seperti film, surat kabar, radio, televisi dan lain sebagainya.

**Komunikan:** Komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran atau penerima pesan dalam komunikasi yang disebut target, khalayak, adopter, komunikan kelompok ataupun massa.

**Pesan:** Pesan adalah keseluruhan pernyataan hal atau informasi yang disampaikan oleh seorang komunikator. Pesan memiliki tema utama sebagai pengarah dalam usaha untuk merubah tingkah laku serta sikap orang lain. Pernyataan itu bisa dalam bentuk verbal bahasa tulisan dan lisan dan non verbal (isyarat) yang dimengerti oleh penerima.

**Saluran:** Saluran merupakan media perantara yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Media dalam pengertian disini bisa media massa yang mencakup surat kabar, radio, film, televisi dan internet. Dan untuk lebih jelas lagi bisa juga melalui saluran kelompok pendengar dan pemirsa, organisasi ibadah, rumah ibadah dan lain-lain.

**Effect:** Effect ialah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh bisa terjadi pada

pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Karena itu, pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan.

## 6. Politik

Dalam kehidupan kita sehari-hari istilah “politik” sudah tidak begitu asing, karena segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kepentingan kelompok atau kekuasaan sering kali diatasmamakan dengan label politik. Pengangkatan atau pencopotan seorang pejabat kepala kantor misalnya, kadang dilakukan atas pertimbangan politik. Konflik yang terjadi dengan memicu pertarungan antara etnis atau agama, juga disebutkan karena politik. Gencarnya pemberitaan tentang teroris dalam media massa juga dinilai memiliki muatan politik.

Dalam *Roget's Trusty Thesaurus*, pelaku politik (politisi) diartikan sama dengan perbuatan korupsi, pembuat rusuh, tukang protes, penipu, dan semacamnya. Politik dicitrakan dengan perbuatan tidak jujur, curang, tega, kotor, dan jahanam. Sebuah penyimpangan perilaku yang keluar dari tatan kehidupam normal. Dalam sebuah survei yang dilakukan pada 1977 oleh perusahaan jejak pendapat Gallup, ditemukan bahwa ada 23% penduduk Amerika tidak menginginkan anak-anaknya memilih profesi sebagai politisi (Ranney, 1990).

### 6.1. Definisi Politik

Istilah ilmu politik (*science politique*) pertama kali digunakan oleh Jean Bodin di Eropa pada 1576, kemudian Thomas Fitzherbert dan Jeremy Bentham pada 1606. Tetapi istilah politik yang dimaksud ialah ilmu Negara sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana Eropa daratan yang bersifat institusional yuridis, sementara yang berkembang di Amerika adalah teori Politik. Konsepsi teori politik dikembangkan di Amerika telah melepaskan diri dari sifat-sifat yang institusional yuridis dengan memberi pengertian yang lebih luas daripada ilmu Negara.

Menurut Gabriel A. Almond, politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dimana kendali ini di sokong lewat instrument yang sifatnya otoritatif dan koersif.

Dalam pandangan para sarjana Amerika, ilmu politik sebagai ilmu Negara bukan lagi dalam pengertian institusi yang statis, tetapi lebih maju dengan melihat negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu definisi-definisi politik belakangan ini lebih banyak memberi tekanan pada negara dalam hubungannya dengan dinamika masyarakat seperti dibuat oleh Kaspar

Bluntschli bahwa ” *politics is the science which is concerned with the state, which endeavors to understand and comprehend the state in its conditions, in its essential nature, its various forms of manifestation, its development*”. Bahkan Harold D. Lasswell lebih tegas merumuskan politik sebagai ilmu tentang kekuasaan “*when we speak of the science of politics, we mean the science of power*”.

P. Eric Laouw dalam bukunya *The Media and Political Process (2005)* mencoba memberi uraian bahwa di tengah kelangkaan sumberdaya yang tersedia, masyarakat akan berusaha mendapatkan akses untuk memperoleh sumberdaya yang terbatas dalam memenuhi tuntutan hidupnya. Jika masyarakat tidak bisa memperoleh kepuasan yang maksimal dalam memenuhi tuntutan hidupnya, maka diperlukan keputusan alokasi sumberdaya. Misalnya siapa yang akan memperoleh apa, bagaimana sumberdaya yang terbatas itu dikelola dengan baik, siapa yang diberi wewenang (legitimasi) untuk mengambil keputusan. Karena keputusan yang diambil bisa menghasilkan ada pihak yang menang dan ada pula yang kalah, maka diperlukan mekanisme untuk mengajak mereka untuk menerima keputusan tersebut.

Selanjutnya, sejak keputusan itu mempengaruhi kesempatan hidup orang, maka akan terjadi perebutan baik antar pribadi maupun antar kelompok untuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi kunci dalam pengambilan keputusan. Perebutan juga timbul dalam memperebutkan nilai-nilai pondasi organisasi dan juga alokasi sumberdaya. Karena itu elemen yang paling mendasar dari politik adalah; sebuah proses pengambilan keputusan, sebuah perebutan untuk memperoleh akses pada posisi pengambilan keputusan, dan proses kewenangan untuk menjalankan keputusan-keputusan itu. Dari pemahaman yang dibuat Eric Low ini, maka politik mengandung sejumlah konsep kenegaraan, yakni; kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy*) dan pembagian atau alokasi sumber daya (*resources*).

Proses perebutan kekuasaan dalam pengambilan keputusan suatu organisasi, sudah pernah dibahas oleh beberapa sarjana ilmu politik, terutama pada kelompok-kelompok organisasi non pemerintah seperti, serikat buruh, perusahaan bisnis, dan asosiasi kesehatan, ternyata mereka berkesimpulan bahwa perebutan kesempatan untuk mendapatkan posisi dalam pengambilan keputusan lebih banyak terjadi, dan lebih keras dalam bidang pemerintahan

dibanding dengan organisasi swasta. Karena itu politik dalam pemahaman di sini lebih ditekankan pada proses pembuatan kebijakan pemerintah (*politics is the process of making government policies*).

Pandangan yang mirip dikemukakan oleh Budiardjo (2002) bahwa politik adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengatur alokasi sumber daya yang ada. Dan untuk melaksanakan kebijaksanaan itu perlu ada kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai, baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang bisa timbul setiap saat. Lebih jauh Budiardjo menekankan bahwa tujuan politik bukan untuk memenuhi kepentingan atau tujuan pribadi seseorang (*private goal*), melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Jadi mendefinisikan "politik" bukanlah pekerjaan mudah, bukan karena tidak adanya definisi politik yang dibuat oleh para pakar, melainkan karena kebanyakan definisi. Begitu banyaknya definisi yang dibuat oleh para pakar sehingga hampir dalam setiap pertemuan yang

membicarakan tentang politik berakhir dengan ketidakadaan definisi yang bisa diterima oleh semua pihak.

## **6.2. Dimensi Politik**

Menyimak pengertian tentang politik yang dibuat oleh para pakar diatas, baik yang beraliran kontinental Eropa yang menekankan negara menurut aspek yuridis, maupun yang berkembang di Amerika yang melihat politik dalam hubungan antara negara dengan masyarakat dalam konteks yang lebih dinamis, maka ilmu politik dalam pembahasannya dapat dilihat dari tiga dimensi, yakni :

### **1. Politik Sebagai Studi Kelembagaan (Institusi)**

Politik sebagai studi kelembagaan objeknya adalah negara. Negara disini dilihat sebagai suatu lembaga yang dibentuk dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat. Negara adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkannya. Sebagai lembaga maka negara memiliki unsur wilayah, penduduk, pemerintah dan kedaulatan. Unsur-unsur ini menjadi modal dasar yang harus dipertahankan untuk eksisnya suatu negara, yakni melindungi wilayah dan penduduknya, memelihara pemerintahannya, serta menjaga kedaulatannya.

Untuk menjaga dan melindungi wilayah, penduduk dan kedaulatan suatu negara, maka pemerintah (negara) memiliki sifat memaksa, monopoli serta sifat mencakup semua. Sifat memaksa, diartikan bahwa untuk menghindari terjadinya anarki atau kekecauan, negara memiliki kekuasaan untuk memaksa agar undang-undang ditaati. Jika tidak maka pelanggar undang-undang akan dikenakan sanksi. Sifat monopoli, diartikan bahwa negara memiliki tujuan, karena itu setiap perilaku masyarakat yang bertentangan dengan tujuan dan cita-cita negara maka negara memiliki kekuasaan untuk melarang. Sedangkan yang dimaksudkan sifat mencakup semua adalah perlakuan sebuah undang-undang atau peraturan yang mencakup semua warga negara tanpa kecuali.

Mengingat bidang studi ilmu politik dalam konteks kelembagaan negara dinilai terlalu statis, karena hanya berfokus pada parlemen (legislatif), kepresidenan, kementerian, dan juga kelembagaan peradilan (yudikatif). maka sejak tahun 1950an sejalan dengan perkembangan aliran behavioristik, terutama dengan perkembangan pendekatan sistem dimana negara tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dilihat

sebagai suatu sistem yang memiliki kaitan dengan unsur-unsur yang membangunnya. Unsur-unsur tersebut antara lain masyarakat dan lingkungan, dan juga kekuatan-kekuatan internasional lainnya. Oleh sebab itu studi ilmu politik tidak lagi memfokuskan diri semata-mata pada ilmu negara, melainkan negara dalam konteks yang berkaitan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi dinamikanya.

## 2. Politik Sebagai Studi Kekuasaan (*Power*)

Hakekat politik pada dasarnya adalah kekuasaan, dengan kata lain untuk mengatur masyarakat agar mereka bisa taat dan tunduk pada aturan, tidak mungkin dapat dilakukan tanpa kekuasaan (*power*). Politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, menjalankan kekuasaan, mengontrol kekuasaan, serta bagaimana menggunakan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sidney Hilmann dalam Ranney (1990) bahwa *politics is the science of who gets what, when and why*.

Pemahaman politik sebagai studi kekuasaan telah mendapat kecaman dengan menempatkan politik dalam area yang sangat sempit, karena ilmu politik tidak hanya mempelajari kekuasaan semata-mata, melainkan juga mempelajari kerjasama antara individu atau pelaku-

pelaku politik. Ilmu politik berusaha menciptakan harmonisasi dalam menciptakan keteraturan dalam masyarakat tanpa paksaan atau penggunaan kekuasaan. Lagi pula politik tidak hanya menyelidiki proses politik, tetapi juga ide-ide politik serta hakekat politik sebagai ilmu yang bisa menciptakan konsep-konsep atau model-model pemerintahan yang baik. Para pengecam khawatir bahwa ilmu politik pada akhirnya hanya akan melahirkan sejumlah teori tentang golongan yang berkuasa (*ruling class*) dan teori tentang elite politik, padahal yang tidak kalah penting adalah golongan yang diperintah yang lebih besar jumlahnya dari golongan yang memerintah.

Meski mendapat kecaman, namun harus diakui bahwa dalam membahas studi politik maka masalah kekuasaan tidak bisa diabaikan. Menurut Lord Russel "kekuasaan sama dengan energi yang bisa menggerakkan kekuatan lainnya. Russel lebih jauh melihat bahwa kekuasaan sangat penting dilihat dari dua hal, yakni selain sebagai gejala sosial juga sebagai naluri individu. Karena itu keinginan untuk berkuasa selalu ada dan menjadi hasrat yang utama bagi setiap manusia. Jadi kekuasaan sebagai fenomena sosial bukan hanya

menjadi objek studi ilmu politik, tetapi merupakan objek yang sangat fundamental bagi setiap ilmu sosial lainnya.

Diantara banyak bentuk kekuasaan, maka kekuasaan politik adalah bentuk kekuasaan yang paling utama dan penting dalam kajian ilmu politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari proses pembentukan sampai pada akibat yang ditimbulkannya. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administratif, legislatif dan yudikatif. Ossip K. Flechtheim dalam Budiardjo (2002) membedakan kekuasaan politik atas dua macam, yakni : (a) bagian dari kekuasaan sosial yang terwujud dalam negara seperti DPR, Presiden dan sebagainya, serta (b) bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara, antara lain aliran atau asosiasi baik yang terang-terangan seperti partai politik, maupun yang tidak menyelenggarakan kegiatan politik, tetapi pada saat tertentu mempengaruhi jalannya pemerintahan, yaitu

organisasi ekonomi, organisasi mahasiswa, organisasi agama, organisasi minoritas, dan sebagainya.

Jadi politik sebagai studi kekuasaan disamping mempelajari kelembagaan negara juga mempelajari lembaga-lembaga lain yang bisa memiliki kekuasaan dalam penentuan kebijakan negara. Misalnya partai politik dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, seperti Non-Government Organization (NGO), kelompok mahasiswa dan kelompok-kelompok keagamaan.

### 3. Politik Sebagai Studi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan harus didahului pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus mencerminkan mayoritas yang mendukung keputusan itu, atau dengan kata lain keputusan yang diambil harus mencerminkan keinginan orang banyak dan bukan keinginan diri sendiri. Esensi pengambilan keputusan dalam politik adalah pengembalian kekuasaan yang mencerminkan representasi publik yang diwakili, sebagaimana dikemukakan oleh Benyamin Disraeli bahwa "*politics are the possession and distribution of power*". (Cummings, 1985). Sebuah pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang mungkin bisa

saja terjadi harus mendapat prioritas daripada kepentingan yang lain. Penentuan prioritas ini harus menjadi suatu kebijakan yang mengikat untuk semua pihak, bukan saja para penyelenggara negara tetapi juga para warga yang menjadi objek dan subyek dari kebijakan itu. Pengambilan keputusan untuk menetapkan prioritas dipandang sebagai suatu kebijakan publik ” *politics is the process of making government policy*”. Tulis Ranney (1990).

Kebijakan publik harus diimplementasikan melalui distribusi alokasi sumberdaya yang memiliki nilai (*values*). Nilai bisa saja dalam bentuk ekonomi sumberdaya alam dan infrastruktur, sementara nilai yang bernilai sosial dalam bentuk kekuasaan (*authority*) karena memiliki nilai prestise sosial dalam memenuhi aktualisasi diri (*self exteem*) seseorang. Dalam pembagian distribusi atau alokasi sumberdaya dalam politik sering menimbulkan konflik. ” *Complict – that is, some form of strunggle among people trying to achieve different goals and satisfy opposing interests*. Konflik adalah bentuk perjuangan diantara orang-orang yang mencoba untuk mencapai tujuan yang berbeda satu sama lain guna memuaskan kepentingannya melalui

nilai-nilai yang diperebutkan itu. Dalam politik, diakui bahwa suatu masyarakat apakah itu tradisional atau modern tidak pernah luput dari apa yang disebut konflik politik. Hanya saja dalam konflik politik tidak didasarkan atas kepentingan diri sendiri melainkan didukung oleh kelompok-kelompok tertentu yang masuk dalam pengaruh suatu aliran atau partai.

## **7. Komunikasi Politik**

Para ahli komunikasi mendefinisikan proses komunikasi sebagai *“knowing what he want to communicate and knowing how he should deliver his message to give it the deepest penetration possible in to the minds of his audience.”* Definisi tersebut mengindikasikan bahwa karakter komunikator selalu berusaha meraih keberhasilan semaksimal mungkin dalam menyampaikan pesan *“the deepest penetration possible.”* Artinya pengertian komunikasi bersumber dari gagasan komunikator yang ingin disampaikan pihak penerima dengan segala daya dan usaha, bahkan tipu daya agar pihak penerima mengena, memahami dan menerima lewat pesan-pesan yang disampaikan.

Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, politik juga seni, karena sudah berapa banyak kita melihat para politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu berkiat dalam hal politik karena memiliki bakat yang dibawa sejak

lahir dari naluri sanubarinya sebagai seniman politik, sehingga dengan karismatik menjalankan roda politik praktis.

Politik juga dapat dikatakan sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan yang memiliki objek, subjek, metodologi, sistem, terminologi, ciri, teori yang khas dan spesifik serta diterima secara universal diseluruh dunia, disamping dapat diajarkan dan dipelajari oleh orang banyak.

Pengertian Komunikasi Politik Menurut Nimmo, Politik berasal dari kata polis yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata polis ini berkembang menjadi *politicos* yang artinya kewarganegaraan. Dari kata *politicos* menjadi *politera* yang berarti hak-hak kewarganegaraan.

Komunikasi Politik merupakan sebuah aktivitas komunikasi, baik verbal maupun non verbal, yang memiliki muatan-muatan politik. Menurut Melvin L. Defleur, kita dapat membaca sebuah aktivitas komunikasi kaitannya dengan politik dengan model transaksional simultan. Dengan karakternya yang nonlinear, model ini sekurang-kurangnya menggambarkan tiga faktor yang berpengaruh dalam proses komunikasi politik. Pertama, lingkungan fisik, yakni lingkungan tempat komunikasi itu berlangsung dengan menekankan pada aspek *what dan how* pesan-pesan komunikasi itu di pertukarkan. Kedua, situasi sosiokultural, yakni komunikasi

merupakan bagian dari situasi sosial yang didalamnya terkandung makna kultural tertentu. Ketiga, hubungan sosial, yakni status hubungan antar pelaku komunikasi sangat berpengaruh, baik terhadap isi pesan itu sendiri maupun terhadap proses bagaimana pesan-pesan itu dikirim dan diterima.

Menurut Harsono Suwardi, dalam arti sempit komunikasi politik adalah setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucapkan ataupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Sedangkan dalam arti luas, komunikasi politik adalah setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan info politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan.

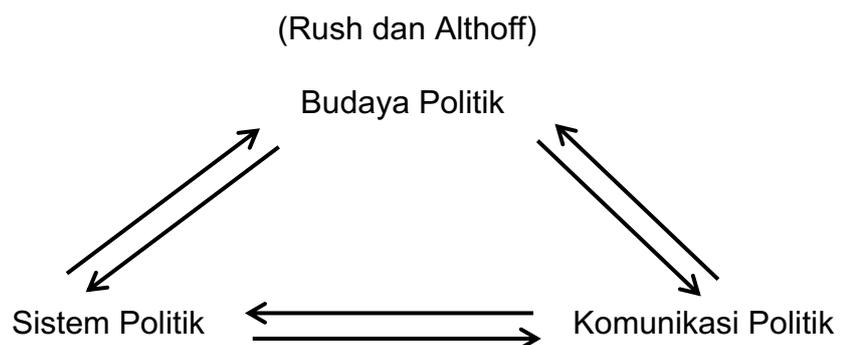
Untuk memahami komunikasi politik harus diperhatikan pengertian- pengertian yang terkandung dalam kedua perkataan tersebut, yaitu komunikasi dan politik, baik secara teori maupun penerapannya (Sumarno, 1989: 5), dengan melihat kaitan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain secara fungsional, di mana terdapat tujuan yang jelas yang akan dicapai. Sanders dan Kaid dalam karyanya, berjudul *Political Communication, Theory and Research: An Overview 1976-1977*”, mengatakan bahwa komunikasi politik harus *intensionally persuasive*.

Penulis Amerika, Doris Grabber mengajukan definisi yang lebih menyeluruh mengenai apa yang dia istilahkan sebagai bahasa politik, yang menunjukkan bahwa definisi ini tidak hanya mencakup retorika namun juga isyarat paralinguistic semisal bahasa tubuh, dan tindakan politik seperti boikot dan protes (1981)

Denton dan Woodward mencirikan komunikasi politik dari segi niat pihak penyampai untuk mempengaruhi lingkungan politik. Mereka berpendapat bahwa “faktor penting yang menjadikan komunikasi bersifat politis bukanlah sumber pesannya, melainkan isi dan tujuannya (McNair,2018 : 4)

Menurut Rush dan Althoff (1997:255) sebagaimana yang dikutip oleh Asep Saipul Muhtadi (2008: 28), Komunikasi politik adalah transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik – merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik; dan proses sosialisasi, partisipasi serta rekrutmen politik bergantung pada komunikasi.

Secara sederhana unsur-unsur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



### **Gambar 2.1 Sistem Politik dalam Komunikasi Politik**

Komunikasi politik adalah salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem politik. Dalam kata-kata Almond sendiri: *“All of the functions performed in the political system – political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication – are performed by means of communication.”*

Dalam buku *The Politics of The Development Areas*, pada tahun 1960. Almond berpendapat bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda (Maswadi Rauf, 1993: 21).

Faktor tujuan dalam komunikasi politik itu, jelas pula tampak pada definisi yang diketengahkan oleh Lord Windlesham dalam karyanya, *What is political communication*, Komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikasi berperilaku tertentu (Effendy, 2002: 158).

Menurut Dan Nimmo (2004: 9) komunikasi Politik yaitu (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi - konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-

kondisi konflik. Sementara menurut Michael Schudson (1997: 311) komunikasi politik itu *“any transmission of message that has, or is intended to have, an effect on the distribution or use of power in society or an attitude toward the use of power”*. Gejala komunikasi politik menurutnya bisa dilihat dari dua arah. Pertama, bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik. Kedua, bagaimana infrastruktur politik merespons dan mengartikulasikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur.

Menurut Dan Powell (1966) komunikasi politik sebagai suatu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem politik. Sementara Astrid mengartikan komunikasi politik sebagai suatu komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Dengan demikian, melalui kegiatan komunikasi politik terjadi pengaitan masyarakat sosial dengan lingkup negara sehingga komunikasi politik merupakan sarana untuk pendidikan politik/kesadaran warga dalam hubungan kenegaraan (Anwar Arifin, 2006: 8-9). Dengan demikian, inti komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh

sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat suatu kelompok atau warga tertentu. Komunikasi politik dengan demikian adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideology tertentu dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan.

Komunikator itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Rakhmat (dalam Dan Nimmo, 2005) digolongkan menjadi tiga yaitu politisi, profesional dan aktivis ketiganya dalam aktivitas keseharian mereka harus melakukan komunikasi politik. Nimmo (2005;30) menjelaskan secara rinci mengenai komunikator politik ini. Ia memaparkan bahwa terdapat tiga macam komunikator politik. Pertama, adalah komunikator politik yang mempunyai pekerjaan sebagai politisi/politikus, mereka adalah calon atau pemegang jabatan tertentu di pemerintahan. Tak peduli apakah ia ditunjuk atau pejabat karir dan tak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif atau yudikatif. Pekerjaan mereka adalah aspek utama kegiatan ini. Politisi atau politikus inilah yang sering juga disebut sebagai elite politik.

Dalam kegiatan keseharian, para politikus harus melakukan komunikasi politik. Hal ini dilakukan, untuk mengomunikasikan pesan pesan politik kepada sesama politikus, pesan politik ini bisa berupa tuntutan, protes dan kebijakan. kemudian, melakukan

komunikasi politik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meraih dukungan masyarakat agar ia tetap bisa menduduki jabatan yang saat ini dimilikinya (bagi yang belum mempunyai jabatan, dukungan masyarakat diperlukan untuk meraih jabatan tersebut).

Kedua; profesional sebagai komunikator politik muncul diakibatkan karena berkembangnya perangkat teknologi media massa. Ia menyuarakan pendapat komunikator politik yang sesungguhnya dan menghubungkan dengan masyarakat, menghubungkan publik umum, dengan pemimpin politik dan membantu menempatkan masalah dan peristiwa pada agenda diskusi publik. Yang termasuk dalam profesional adalah para jurnalis (reporter, koordinator berita, penerbit, pengarah berita, eksekutif stasiun dan lainnya). Profesional lainnya adalah promotor, ia adalah orang yang dibayar untuk mengajukan kepentingan langganan tertentu. Seperti agen publisitas, tokoh masyarakat, pejabat humas, pejabat informasi publik, sekretaris presiden dan lainnya (Dan Nimmo, 2005: 35).

Para jurnalis dan promotor ini bekerja sebagai penghubung antara komunikator politik yang sebenarnya dengan masyarakat. Selain menyuarakan pendapat komunikator politik para profesional khususnya jurnalis juga menjadi penghubung pendapat yang datangnya dari masyarakat.

Komunikator yang ketiga adalah aktivis, yang dimaksud dengan aktivis adalah orang-orang yang tidak bekerja untuk kepentingan politik. Namun tugasnya adalah menjadi juru bicara atau sebagai peloby. Politik bukan lapangan pekerjaannya, namun ia terlibat baik dalam kegiatan politik walaupun dalam komunikasi. Karena itulah ia disebut aktivis politik.

Aktivis lainnya yang juga berfungsi sebagai komunikator politik adalah pemuka masyarakat. Ia disebut aktivis karena banyak orang yang meminta pendapatnya, khususnya ketika mereka akan memutuskan memilih kandidat dalam pemilihan umum. Pemuka masyarakat biasanya orang-orang yang aktif menyimak berita di media massa. Ia menjadi narasumber bagi orang-orang yang pasif.

Di dalam komunikasi politik, opini publik memiliki peran penting dalam strategi komunikasi seorang kandidat. Opini sudah terbentuk jika pendapat yang semula dipertentangkan sudah tidak lagi dipersoalkan. Menurut James Bryces dalam "*Modern Democracy*" opini publik merupakan kumpulan pendapat dari sejumlah orang tentang masalah-masalah yang dapat mempengaruhi atau menarik minat atau perhatian masyarakat di suatu daerah tertentu. Secara sederhana opini publik merupakan kegiatan untuk mengungkapkan atau menyampaikan apa yang oleh masyarakat tertentu diyakini, dinilai dan diharapkan oleh seorang

untuk kepentingan mereka dari situasi tertentu, dan isu diharapkan dapat menguntungkan pribadi atau kelompok (Heryanto, 2011: 90).

Salah satu pengaruh penting pada pendapat kita adalah media. Media telah membantu membentuk siapa kita saat ini. Seringkali pengaruh ini tidak kentara, dan pada kesempatan lainnya pengaruh ini lebih nyata. Pengaruh media terhadap opini publik adalah apa yang dipelajari oleh Elizabeth Noelle Neumann yang dapat dilacak kembali hingga pada tahun 1930-an dan 1940an. Tetapi ia mengonseptualisasikan teori spiral keheningan (*spiral of silence*) pada awal tahun 1970an.

Noelle Neumann berfokus pada apa yang terjadi ketika orang menyatakan opini mereka mengenai topik-topik yang telah didefinisikan oleh media bagi publiknya. Teori spiral keheningan menyatakan bahwa orang yang yakin bahwa mereka memiliki sudut pandang yang minoritas mengenai isu-isu publik akan tetap di latar belakang di mana komunikasi mereka akan dibatasi, mereka yang yakin bahwa mereka mempunyai sudut pandang yang mayoritas akan lebih terdorong untuk membuka suara. Noelle Neumann (1983) menyatakan bahwa media akan lebih berfokus pada pandangan mayoritas, dan meremehkan pandangan minoritas. Mereka yang minoritas akan menjadi lebih tidak asertif dalam mengomunikasikan opini mereka dan karenanya menyebabkan sebuah kumpulan spiral komunikasi yang bergerak ke bawah. Hal yang menarik mereka yang

berada di kaum mayoritas akan menilai pengaruh mereka secara berlebihan dan semakin berani dalam komunikasi mereka, sebagai akibatnya media akan melaporkan opini dan kegiatan mereka (Richard West dan Lynn H. Turner, 2008: 120)

Seringkali opini publik diciptakan atau didominasi oleh orang atau kelompok kepentingan tertentu, sehingga khalayak tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya atau berdiri dengan opininya sendiri. Apalagi untuk konteks masyarakat yang masih menaruh penghargaan tinggi terhadap ruang ketokohan, sehingga opini minoritas cenderung tenggelam oleh arus opini mayoritas. Teori ini ingin menjawab pertanyaan, mengapa orang-orang dari kelompok minoritas sering merasa perlu untuk menyembunyikan pendapat dan pandangannya ketika berada dalam kelompok mayoritas? Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa seseorang sering merasa perlu menyembunyikan “sesuatu”-nya ketika berada dalam kelompok mayoritas.

Ada dua asumsi di dalam teori ini. Pertama, bahwa orang mengetahui mana opini yang berkembang dan mana opini yang tidak berkembang. Hal ini disebut quasi-statistical sense karena orang mempunyai perasaan terhadap presentase penduduk untuk dan terhadap posisi-posisi tertentu. Asumsi kedua, adalah bahwa orang menyesuaikan pengungkapan opini mereka terhadap persepsi-persepsi ini.

### **7.1. Fungsi Komunikasi Politik**

Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Dengan definisi lain, fungsi komunikasi politik itu adalah fungsi struktur politik menyerap berbagai aspirasi, pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam penentuan kebijaksanaan. Selain itu, fungsi komunikasi politik juga merupakan fungsi penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat. Dengan demikian fungsi ini membawakan arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat (Sastroatmodjo, 1995: 123).

Fungsi komunikasi politik yang dikemukakan oleh McNair dalam Cangara (2016 : 34) dikombinasikan dengan fungsi komunikasi yang dibuat oleh Goran Hedebro (1982), Komunikasi politik berfungsi untuk:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat;

2. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program dan tujuan lembaga politik;
3. Memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris dan para pendukung partai;
4. Menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik;
5. Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara-cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara;
6. Menjadi hiburan masyarakat sebagai pesta demokrasi dengan menampilkan para juru kampanye artis, dan para komentator atau pengamat politik;
7. Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna menghindari konflik dan ancaman berupa tindakan separatis yang mengancam persatuan nasional;
8. Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi;

9. Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda setting maupun melalui komentar-komentar politik.
10. Menjadi *watchdog* atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya *goodgovernment* yang transparansi dan akuntabilitas.

Dari beberapa definisi tentang politik dapat dilihat bahwa kegiatan perpolitikan tidak bisa terlepas dari kegiatan berkomunikasi, baik individu dengan individu atau kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Dari definisi di atas berafiliasi dengan yang dilakukan oleh pasangan Ratu Atut-Rano Karno dan tim suksesnya, mereka melakukan strategi komunikasi politik untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat Banten dalam Pilkada Banten 2011, agar dapat mendominasi serta memenangkan pilkada tersebut.

Strategi komunikasi politik tim sukses pasangan Ratu Atut-Rano Karno dibuat berdasarkan latar belakang serta analisa-analisa dari hasil situasi pada saat strategi tersebut akan dijalankan. Perumusan strategi komunikasi khususnya pada sebuah kampanye politik akan melalui waktu yang relatif lama, dikarenakan banyaknya pertimbangan sehingga pada akhirnya suatu strategi komunikasi politik diaplikasikan. Dan strategi komunikasi yang efektif adalah yang fleksibel di

sini adalah dapat berubah sesuai dengan kebutuhan baik situasi dan kondisi di lapangan.

Untuk menghasilkan strategi komunikasi politik yang efektif posisi komunikator juga sangat menjadi bahan pertimbangan penting, karena komunikator dalam hal ini pasangan Ratu Atut dan Rano Karno, keduanya memiliki ketokohan yang sangat diperhitungkan di kalangan masyarakat Banten. Posisi Ratu Atut selain sedang menjabat gubernur Provinsi Banten, Rano Karno merupakan seorang aktor populer dan masih menjabat sebagai wakil bupati Tangerang. Peran dan rekam jejak sebagai seorang pemimpin akan mempengaruhi persepsi khalayak publik dalam menilainya. Dan ini akan memberikan pengaruh yang besar terhadap terbentuknya opini publik.

## **7.2. Etika Komunikasi Politik**

Etika menjadi pembahasan karena menyangkut interaksi yang terjadi antara konsultan politik dan aktor-aktor partai politik, kandidat atau calon dalam mengomunikasikan pesan-pesan politik beserta aktivitas politik mereka.

Etika dalam buku K Bertens (2000) dikatakan seperti halnya dengan banyak istilah yang menyangkut konteks ilmiah, istilah “etika” pun berasal dari Yunani Kuno. Kata

Yunani Ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (ta etaha) adalah adat kebiasaan. Etika merupakan suatu tipe pembuatan keputusan yang bersifat moral, dan menentukan apa yang benar dan salah yang dipengaruhi oleh aturan hukum yang benar atau salah di masyarakat. Dalam kamus bahasa Indonesia yang baru. Etika dibedakan menjadi tiga arti: Pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Pembahasan masalah etika komunikasi manusia biasanya berkisar pada penilaian terhadap perilaku benar atau salah, dampak potensial dari perilaku tersebut, dan sikap terhadap pilihan-pilihan penting yang dilakukan secara sadar. Secara lebih khusus, standar seperti: kejujuran, penepatan janji, kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan, dikenal sebagai tujuan etika yang penting. Dalam politik, banyak masalah etika yang berkisar masalah keyakinan rasionalitas manusia dan proses ideal demokrasi.

Komunikasi seharusnya mendorong kemampuan untuk berpikir secara rasional, sebuah perspektif secara jelas menganggap tujuan dari komunikasi politik seharusnya menciptakan pemilih yang terinformasi. Apabila pemilih akan membuat sebuah pilihan rasional tentang pemimpin atau isu-isu kebijakan, mereka harus memiliki akses pada informasi yang benar dan akurat, tidak ambigu, tidak emosional sebagai dasar dalam penentuan pengambilan keputusannya.

Berpolitik adalah meluangkan waktunya untuk ikut andil dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Tujuan politik pada hakekatnya merupakan sebuah misi yang mulia, yakni menyejahterakan kehidupan bersama. Berpolitik bukan sebuah profesi yang untuk mengais rizeki atau dijadikan ladang pekerjaan semata tanpa ada agenda besar perjuangan untuk rakyat. Oleh karena itu, etika komunikasi politik menjadi perhatian penting terutama untuk para politisi atau pejabat yang memiliki otoritas kebijakan.

## **8. Teori Retorika**

Menurut Aristoteles, retorika adalah kemampuan retorikan untuk mengemukakan sesuatu, dan dalam penyampaiannya tersebut, retorikan dapat memberikan efek persuasif kepada para pendengarnya. Secara etimologis, retorika berasal dari Bahasa Yunani, "*rhethrike*" yang berarti seni kemampuan berbicara yang

dimiliki seseorang. Aristoteles dalam bukunya "*Rhetoric*" mengemukakan pengertian retorika, yaitu kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu secara efektif untuk mempersuasi orang lain.

Sedangkan menurut Gorys Keraf, retorika adalah suatu istilah secara tradisional yang diberikan pada suatu teknik pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun baik. Menurut P. Dori Wuwur Hendrikus, retorika adalah kesenian untuk berbicara baik yang digunakan dalam proses komunikasi antarmanusia.

Kajian retorika secara umum didefinisikan sebagai simbol yang digunakan manusia. Pada awalnya ilmu ini berhubungan dengan persuasi sehingga retorika adalah seni penyusunan argumen dan pembuatan naskah pidato. (Karen A. Foss, Stephen W. Littlejohn, 2014: 73).

Retorika didefinisikan sebagai *the art of constructing arguments and speechmaking* (seni membangun argumentasi dan seni berbicara). Dalam perkembangannya, retorika juga mencakup proses untuk menyesuaikan ide dengan orang dan menyesuaikan orang dengan ide melalui berbagai macam pesan. (*adjusting ideas to people and people to ideas in messages of all kinds*). (Morissan, 2013: 44).

Menurut Littlejohn dkk (2011) yang menjadi inti tradisi retorika adalah Lima Hukum Retorika atau *The Five Canons of Rhetoric* yaitu *invention* atau penemuan, *arrangement* atau penyusunan, *style* atau gaya, *delivery* atau penyampaian, dan *memory* atau pengingatan.

- a. *Invention* atau penemuan mengacu pada penggalian dan penemuan ide atau gagasan serta penelitian khalayak guna mengetahui metode persuasi yang akan digunakan.
- b. *Arrangement* atau penyusunan mengacu pada pengorganisasian ide atau gagasan menjadi pesan
- c. *Style* atau gaya mengacu pada pemilihan kata-kata atau bahasayang tepat.
- d. *Delivery* atau penyampaian mengacu pada penyampaian pesan secara lisan oleh retor atau pembicara.
- e. *Memory* atau pengingatan mengacu pada kemampuan retor atau pembicara untuk mengingat apa yang akan disampaikan kepada khalayak.

Menurut Aristoteles, keindahan bahasa hanya dapat digunakan untuk 4 hal yaitu, membenarkan (*corrective*), memerintah (*instructive*), mendorong (*suggestive*), serta mempertahankan (*deensive*). Tradisi retorika dapat menjelaskan

baik dalam konteks komunikasi antar personal maupun komunikasi massa.

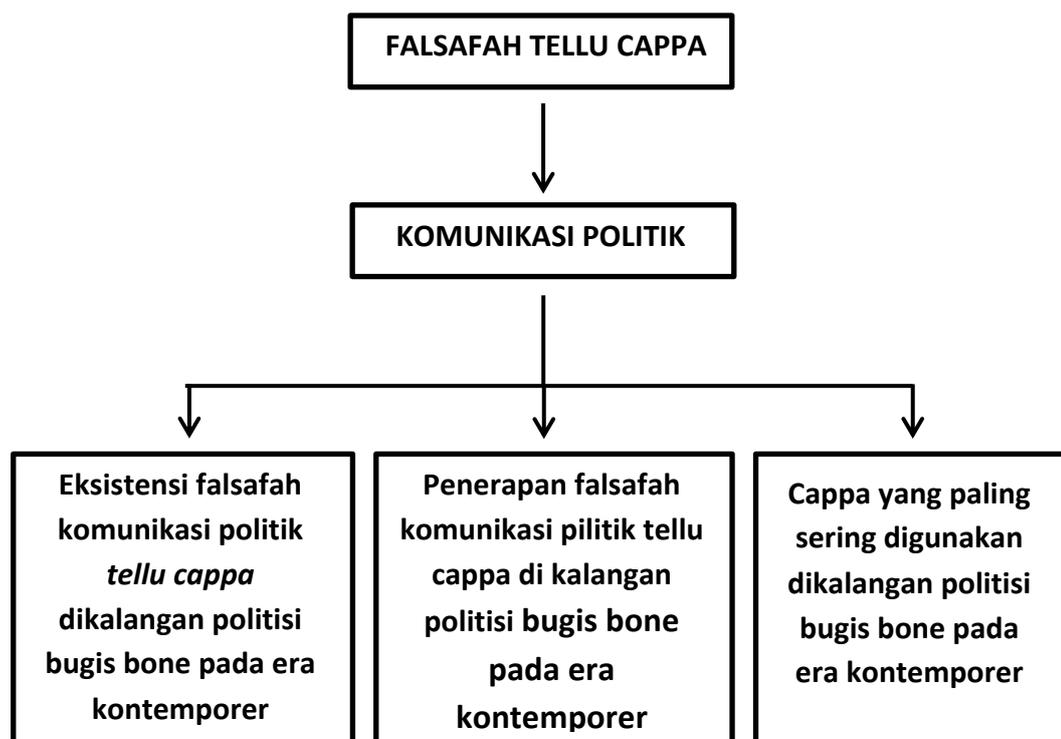
Retorika memiliki makna yang berbeda dalam periode yang berbeda, terdapat 6 periode tradisi retorika, antara lain: zaman klasik, pertengahan, renaissance, pencerahan, kontemporer, dan postmodern. (Karen A. Foss, Stephen W. Littlejohn, 2014: 73).

- a. Zaman klasik dari abad ke 5 sampai abad ke 1 sebelum masehi, didominasi usaha untuk mendefinisikan dan Menyusun peraturan seni retorika. Mengarah pada pendekatan relativistic *Sophist* terhadap pengetahuan yang meyakini adanya kemungkinan ideal atau kebenaran absolut.
- b. Zaman pertengahan (400-1400 Masehi) memandang kajian retorika yang berfokus pada permasalahan penyusunan dan gaya. Retorika zaman ini telah merendahkan praktik dan seni pagan, serta berlawanan dengan Kristen yang memandang kebenaran itu sebagai sebuah keyakinan.
- c. Zaman Renaissance (1300-1600 Masehi) memandang sebuah kelahiran kembali dari retorika sebagai filosofi seni, dapat menemukan kembali teks retorika klasik dalam sebuah usaha untuk mengenal dunia manusia.
- d. Zaman Pencerahan (1600-1800 Masehi) retorika dibatasi karena gayanya, memunculkan gerakan belles lettres yang berarti surat-surat indah atau menarik. Mengacu pada karya

sastra dan semua karya seni murni (puisi, drama, musik, bahkan berkebun).

- e. Zaman kontemporer (abad ke 20) menunjukkan pertumbuhan dalam retorika ketika jumlah, jenis, dan pengaruh simbol- simbol meningkat. Retorika bergeser fokusnya dari pidato ke semua jenis penggunaan simbol.
- f. Post modern (abad ke 21) dimana aliran ini merupakan alternatif yang dimulai dari asumsi dan nilai- nilai acuan yang berbeda, untuk menghasilkan suatu retorika yang berbeda pula.

### C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Pengarah



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Politik pada hakekatnya merupakan kegiatan seseorang secara kolektif sangat mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinterpretasikan dan dipertukarkan melalui komunikasi.

Pada penelitian ini, terma komunikasi akan lebih difokuskan pada falsafah Bugis *tellu cappa* dengan menggunakan teori komunikasi politik. Galnoor menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial dimana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran (Arifin, 2003 : 9). Kerangka yang diberikan ilmu komunikasi bagi komunikasi politik adalah sebagaimana digambarkan dalam paradigam Laswell : Siapa mengatakan apa?, dengan saluran apa?, kepada siapa dan dengan akibat apa?. Paradigma ini mengklaim bahwa unsur-unsur komunikasi tersebut berlaku dalam setiap proses komunikasi, dan berlaku inheren dalam komunikasi politik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan hasil penelitian secara rinci dan aktual sesuai masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.

Adapun jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dimana peneliti berusaha mendeskripsikan atau mengontruksi hasil wawancara pada obyek penelitian. Imam Gunawan, (2015: 80)

Dengan demikian data dan informasi yang diperoleh selanjutnya akan dianalisa melalui analisis data kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peneliti.